

**HAKEKAT KEMERDEKAAN INDIVIDU  
DALAM KERANGKA *HUMAN SECURITY* DI INDONESIA**



Skripsi

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada*

*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

**ALDY MUHAMMAD ZULFIKAR**

E 131 09 005

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **HAKEKAT KEMERDEKAAN INDIVIDU DALAM KERANGKA**  
***HUMAN SECURITY* DI INDONESIA**

NAMA : ALDY MUHAMMAD ZULFIKAR

NIM : E13109005

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, Oktober 2013

Mengetahui :

Pembimbing 1,

Pembimbing II,

**Drs. Patrice Lumumba, MA**  
NIP. 19611012 198701 1 001

**Drs. H. Husain Abdullah, M.Si**  
NIP. 19640812 199003 1 002

Mengesahkan:

Ketua Jurusan,

**Dr. H. Adi Suryadi B, MA**  
NIP. 19630217 199202 1 001

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : **HAKEKAT KEMERDEKAAN INDIVIDU DALAM KERANGKA  
*HUMAN SECURITY* DI INDONESIA**

NAMA : ALDY MUHAMMAD ZULFIKAR

NIM : E13109005

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar sarjanan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari, Kamis, 31 Oktober 2013.

### TIM EVALUASI

Ketua	: Drs. Patrice Lumumba, MA	.....
Sekretaris	: Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si	.....
Anggota	: 1. Drs. H. Husain Abdullah, M.Si	.....
	2. Agussalim, S.IP, MIRAP	.....
	3. Burhanuddin, S.IP, M.Si	.....

## KATA PENGANTAR

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya dalam hidup ini. Segala berkah kesehatan dan kecerdasan yang tidak pernah putus hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dibawah naungan agama islam sebagai berkah kita semua tentunya. Penulisan kata pengantar ini tentu saja sebagai wujud apresiasi kami kepada seluruh pihak yang telah banyak mendukung kami selama menjalani pendidikan di kampus kami yang tercinta Universitas Hasanuddin, Makassar sejak 2009 hingga 2013.

Pertama, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga yang senantiasa mendukung kami dalam prosesi penyelesaian masa studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Makassar. Paling utama ditujukan kepada Ibunda **Hj. Wardaningsih** dan Ayahanda **Drs. H. Abdul Rajab Samad, MM** yang tentu saja memberikan dukungan paling utama dalam pendidikan yaitu *financial support and moral support*. Terima kasih selanjutnya kepada seluruh saudara/i kandung kami, **Aldila Arfanita, SE** selaku kakak pertama yang juga banyak membantu dalam *financial support*. Kakak kedua **Alfian Ahmad Affandi, SE**, kakak ketiga **Alpacino Muhammad Reza, SS**, Kakak keempat **Albar Ahmad Januarizal**, serta adik bungsu **Aldino Achmad Fauzi** yang turut mendukung kami agar dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Kedua, rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh komponen civitas akademika Universitas Hasanuddin yang telah turut andil dalam mendorong kemajuan pendidikan di kampus ini. Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh jajarannya, Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional beserta seluruh jajarannya, terima kasih banyak kami haturkan dari lubuk hati yang paling dalam. Seluruh komponen pengajar jurusan HI, **Pak Adi, Ibu Puspa, Ibu Seni, Ibu Isdah, Pak Bur, Pak Darwis, Pak Nasir, Pak Aspi, Pak Husain, Pak Patrcie, Kak Gego, Kak Agus, Bang Ishaq** serta staf jurusan **Bunda** dan **Kak Rahmah** terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Ucapan terima kasih yang terdalam juga kepada penasihat akademik selaku pembimbing I kami, bapak **Patrice Lumumba** dan pembimbing II, bapak **Husain Abdullah** yang telah mendampingi dan membimbing kami dalam proses penyelesaian skripsi ini yang berjudul :

### **“Hakekat Kemerdekaan Individu Dalam Kerangka *Human Security* di Indonesia”**

Ketiga, rasa terima kasih ini untuk seluruh kerabat yang telah membantu dalam meminjamkan sarana berupa Laptop maupun bahan lainnya dalam proses penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Laptop **Alif Arhandra Putra** dan **Bama Andhika Putra** kami gunakan dalam proses penyelesaian proposal hingga memasuki masa seminar proposal. Laptop **Andi Nurul**

**Azizah** dan **Sam Wahyudi Junaib** kami gunakan dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi dapat dirampungkan secara baik dan utuh. Kanda **Temanengnga** dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memberikan banyak materi dan bahan kunci dalam menyelesaikan penelitian kami sehingga dapat diolah menjadi sebuah masukan dalam skripsi ini.

Keempat, rasa terima kasih ditujukan kepada seluruh keluarga besar kami di UKM **Paduan Suara Mahasiswa (PSM)** Universitas Hasanuddin yang turut serta dalam memberi pengalaman yang sangat luar biasa bersama kami dalam mengukir prestasi baik secara nasional bahkan tingkat internasional selama kami menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Empat tahun sudah lamanya kami berkarir mengukir berjuta pengalaman dan sejumlah prestasi dalam UKM ini. Tentu saja membuat catatan sejarah yang sangat indah dan haru bagi kami. Kanda **Anshari Sanusi** sebagai pelatih/konduktor/manajer **PSM** sangat lihai dalam terus mengangkat nama baik UKM ini, tentu saja terima kasih kami untuk beliau yang telah mengizinkan kami dapat ambil bagian dalam menulis cerita bahagia dan tak terlupakan bersama **PSM** ini. Begitu banyak saudara/i kami dalam UKM ini yang bertugas sebagai sahabat untuk memberi dukungan penuh kepada kami dalam menjalani aktifitas disini, sebut saja yang terkhusus: **Uya, MIT, Qutub, Kak Belly, Kak Ismawan, Kak Fadil, Kak Gerorld, Kak Hikmah, Kak Ita, Kak Yuntris, Kak Amel, Kak Unhy, Kak Alind, Kak Ali, Kak Tam-tam, Kiki, Vita, Ekhi, Liku, Oshyn, Bojes, Lipoeto, Riza, Azizah, Mardhiati, Farah, Mimi, Rima**. Selain itu, kepada seluruh tim kompetisi **PSM Unhas** yangmana kami pernah tergabung didalamnya, seperti : **Tim World CG, Shaoxing-China 2010** (gagal berangkat), **Tim PESPARAWI Nasional Mahasiswa, Palangkaraya 2010, Tim Bandung ICC 2011, Tim Xinghai PICC, Guangzhou 2012, dan Tim Rimini ICC, Italy 2013**. Begitu banyak kawan yang tergabung didalamnya dan tidak akan sempat disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih banyak untuk kalian saudara/i kami yang tercinta.

Kelima, rasa cinta dan kasih sayang kepada saudara/i seikat **Beswan Djarum 27**, kalian luar biasa. Begitu banyak pengalaman indah bersama kalian karena kita terikat dalam naungan **Nation Building 'Indonesia Digdaya'**. Sahabat dari seluruh penjuru nusantara, kami dipertemukan dalam program **Djarum Beasiswa Plus Periode 2011/2012**, dari **Djarum Bakti Pendidikan – Djarum Foundation**. Beragam latar belakang dari seluruh penjuru tanah air, telah berhasil mengumpulkan banyak pemuda-pemudi berbakat untuk terus didorong rasa kebangsaannya kepada Republik Indonesia ini. Terima kasih untuk dukungan moralnya selama ini.

Rasa terima kasih juga untuk seluruh sahabat-sahabatku, **Sam, Ulla, Imam, Patrik, Fajrul, Fawzy, Chalik, Fadlan, Nur Adnan, Ichsan, Arief, Adi, Ridho, Hafidz, Adil, Ruli, Ario, Baso, Ilham, Ilman, Adnan** dan yang tidak sempat disebutkan namanya. Mereka semua sahabat yang terus berjalan didunianya masing-masing tapi tidak lupa untuk terus saling mengingatkan dalam kebaikan hidup bahkan memberi semangat dalam prosesi penyelesaian studi kami masing-masing. Kang **Arvin** yang sempat menjadi mentor vokal kami, terima kasih banyak karena turut memberikan banyak tambahan ilmu dalam dunia tarik suara maupun musik, termasuk kepada seluruh keluarga besar **Agriaswara IPB** dan **PSM Unpad** yang telah mengizinkan kami dapat ikut berlatih bersama kalian. Menjadi tambahan pengalaman baru bagi kami sebelum meninggalkan dunia kampus sepenuhnya.

Sebagai bagian akhir dari pengantar ini, rasa bangga kami kepada seluruh keluarga 'angkatan rapuh' *class of 2009* Hubungan Internasional Universitas

Hasabuddin. Kami yang terikat dalam keluarga ini telah banyak menulis cerita bersama baik suka maupun duka. Tiada kesan yang sangat indah tanpa kehadiran personil keluarga ini. Merekalah yang bersama kami selalu dalam menempuh pendidikan di jurusan ini. Menjadi teman belajar di dalam kelas bahkan sahabat di luar kelas. Rapuh dalam hal ini bukanlah suatu makna yang sesungguhnya, namun kata ini dapat menjadi sebuah pijakan bersama agar kami dapat menjaga keutuhan bersama akan indahnya keluarga kami dalam angkatan ini.

**Amdya, Bama, Dwi, Dita, Muspida, Purnamasari, Satkar** menjadi sosok pertama yang mendobrak pintu ‘angkatan rapuh’ untuk mendapatkan gelar sarjananya. Disanalah kisah haru ini dimulai. Beberapa sahabat dari ‘angkatan rapuh’ berhasil membuktikan kemampuan dirinya untuk dapat menyelesaikan pendidikan di jurusan ini hanya dalam waktu pendidikan 3 tahun 5 bulan setelah melalui prosesi wisuda Maret 2013 lalu. Mereka menjadi garda terdepan kami yang siap menempuh perjuangan di dunia luar kampus. Namun, kamipun sadar inilah saat sebuah kata perpisahan itu akan sangat bermakna dalam dan mengharukan untuk direnungkan. **April, Chalik, Christiansen, Dissa, Fadhilah, Fatma, Fardillah, Hutri, Icha, Ivon, Nurul, Rahmat, Vinsen**, menyusul mendapatkan gelar S.Ip pada bulan Juni 2013. Menjadi anggota keluarga berikutnya yang meninggalkan kami dari dunia kampus. Selanjutnya disusul oleh **Ayu, Inna, Wani** yang melalui prosesi wisuda pada bulan September 2013. Akhirnya **Claudia** yang menjadi saudara seperjuangan kami dalam prosesi penyelesaian skripsi hingga memasuki sidang akhir dan hanya kami berdualah dari ‘angkatan rapuh’ yang dapat masuk wisuda pada Desember 2013. Disinilah salah satu selebrasi yang begitu sepi kami rasakan.

Saat ini tersisa **Prawira, Efrianto, Faiz, Ridho, Riri, Fikri, Ishaq, Sutiono, Chida, Manda, Nani, Michael, Syukran, Benji, Afif, Fikar, Langgam** yang berikutnya tidak lama lagi juga akan menyusul untuk mendapatkan gelar sarjananya, amin. Setidaknya *Class of 2009* Hubungan Internasional Unhas ini awalnya berjumlah 47 orang. Namun, **Ucha** bermigrasi ke Fakultas Sastra, **Azlan** dan **Enal** berhijrah ke Fakultas Hukum serta **Inry** dan **Kiky** yang tidak tahu keberadaannya sekarang. Seucap kata terima kasih untuk persembahan kalian yang diukir indah bersama kami. Kami doakan kalian selalu sukses dijalannya masing-masing dan terus berada dalam lindungan Tuhan YME.

Terkhusus buat **Muh. Nurchalik Djirimu** di China, **Satkar Ulama** di Malaysia, **Dwi Purnama** di United Kingdom, yang sedang berusaha menempuh pendidikan lanjutnya. Kalian luar biasa, teruslah semangat dalam berjuang disana. Rasa bangga disertai doa dari kami menyertai perjuangan keras kalian sahabat. Akhirnya, *special thanks to Bama Andhika Putra* yang kini akan menempuh pendidikan *postgraduate* di University of Melbourne, Australia. **Bama** menjadi sosok luar biasa yang berada disamping kami. Lelaki berkumis tebal dan berambut klimis dengan kemampuan sedikit diatas rata-rata dari ‘angkatan rapuh’. Dialah sang *wonder boy*, cukup lihai dalam berbahasa Inggris dan telah banyak mengukir banyak prestasi baik dalam skala Nasional bahkan Internasional. Dialah sahabat terdekat kami dalam menempuh pendidikan di kampus merah ini. Kami jadikan dia sebagai saingan terberat dalam hidup kami, dan sebagai pendorong hidup untuk dapat mengerjakan keteringgalan dalam capaian hidupnya. Namun, dia juga yang senantiasa mendukung kami dalam mengejar cita-cita dan pengalaman kami pribadi. Terima Kasih banyak saudaraku **Bamzki**, kami doakan kesuksesan dalam kehidupanmu juga mendatang.

Sampailah pengantar ini pada bagian penutupnya. Skripsi ini menjadi sebuah syarat yang paling utama dalam memperoleh gelar sarjana kami. Akhirnya semua tahapan dapat kami lalui untuk memperoleh gelar sarjana tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami. Menyadari sepenuhnya akan keterbasan kami dalam penyusunan skripsi ini, maka kami sebagai manusia biasa turut menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembaca skripsi ini kedepannya sekiranya ditemukan suatu kesalahan penulisan atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Kami sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran dalam memperbaiki pribadi kami dimasa yang akan datang. Silahkan menghubungi kami ke [aldhyjie@gmail.com](mailto:aldhyjie@gmail.com) atau mention ke twitter @aldhyhie. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

**Wassalamu Alaikum, Wr. Wb.**

Makassar, 31 Oktober 2013  
*Best Regards,*  
Penulis

**Aldy Muhammad Zulfikar**  
**E131 09 005**

## ABSTRACT

***Aldy Muhammad Zulfikar, E131 09 005. “Hakekat Kemerdekaan Individu Dalam Kerangka Human Security di Indonesia”. First Advisor Mr. Patrice Lumumba and Second Advisor Mr. Husain Abdullah, Department of International Relations, Faculty of Social Science and Political Science, Hasanuddin University, Makassar. This research aimed to determine and describe the substance of individual liberty, measured in the frame of human security in Indonesia, namely that based on the mandate of the constitution of the Republic of Indonesia. Describe some of the phenomena that occurred in Indonesia and further review in the enforcement of this Human Security. This is done to look at the real running of individual liberty in Indonesia should be maintained in full.***

*In connection with the purpose to be achieved, then the writing of this essay using descriptive research methods. Data collection techniques that writers use is the research library with theoretical data derived from sources in the form of books, magazines, newspapers, journals both in print as well as electronic media such as the internet. As for analyzing the data, the writer uses qualitative data analysis techniques .*

*The results show, that the quiddity of individual liberty with the human security framework in Indonesia, indeed imprinted in the constitution of the Republic of Indonesia, which is the opening of the 1945 Constitution and Pancasila, Indonesia where each individual is guaranteed to be truth and dignity as a human being intact and have the right to live and the right work and gain prosperity. This means that the individual liberty should be able to make full and complete set of all the people of Indonesia in accordance with the country's foundation. All of this is the accumulation of human rights actually refers to human security solutions including personal security and economic security and food security as a benchmark in this study .*

**Keyword :** *Individual Liberty, Human Security Indonesia*



## ABSTRAKSI

**Aldy Muhammad Zulfikar, E131 09 005, dengan skripsi berjudul “Hakekat Kemerdekaan Individu Dalam Kerangka *Human Security* di Indonesia” dibawah bimbingan Patrice Lumumba sebagai pembimbing 1 dan Husain Abdullah sebagai pembimbing II, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan substansi kemerdekaan individu, dinilai dalam bingkai *human security* yang terjadi di Indonesia, yakni yang berdasar pada amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Menggambarkan beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia dan selanjutnya ditinjau dalam penegakan *Human Security* ini. Hal ini dilakukan untuk melihat secara nyata berjalannya kemerdekaan individu di Indonesia harus dijaga secara penuh.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* dengan menggunakan data teoritis yang berasal dari sumber berupa buku, majalah, surat kabar, jurnal baik dalam bentuk cetak maupun media elektronik seperti internet. Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hakekat kemerdekaan individu dalam kerangka *human security* di Indonesia, sesungguhnya telah terpatrit dalam konstitusi Republik Indonesia, yakni pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, dimana setiap individu di Indonesia dijamin akan hakekat dan martabatnya sebagai manusia yang utuh dan memiliki hak hidup dan hak berusaha serta memperoleh kesejahteraannya. Artinya kemerdekaan individu harus dapat diwujudkan secara utuh dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan tuntutan landasan negara ini. Kesemuanya ini adalah akumulasi dari hak asasi manusia secara kongkret merujuk pada rumusan *human security* yang meliputi *personal security* serta *economic security* dan *food security* sebagai tolak ukur dalam penelitian ini.

Kata kunci: *Kemerdekaan Individu, Human Security, Indonesia*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	1
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	2
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	3
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	4
<b>ABSTRACT</b> .....	8
<b>ABSTRAKSI</b> .....	9
<b>DAFTAR ISI</b> .....	10
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	11
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	18
D. Kerangka Konseptual .....	18
E. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep tentang Kemerdekaan Individu .....	23
B. Konsep tentang <i>Human Security</i> .....	27
<b>BAB III. IDENTIFIKASI KEMERDEKAAN INDIVIDU DAN HUMAN SECURITY</b>	
A. Kemerdekaan Individu .....	31
1. Landasan Konstitusional .....	31
2. Ruang Lingkup dan Tujuan Kemerdekaan Individu .....	38
B. <i>Human Security</i> .....	42
1. Arti <i>Human Security</i> .....	43
2. Klasifikasi <i>Human Security</i> .....	49
<b>BAB IV. SUBSTANSI KEMERDEKAAN INDIVIDU DALAM KERANGKA HUMAN SECURITY DI INDONESIA</b>	
A. Keterjaminan Hak Hidup .....	57
B. Keterjaminan Berusaha dan Kesejahteraan .....	61
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	75
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	 76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Arus pergerakan aktor hubungan internasional masa kini mulai sangat beragam, tidak lagi didominasi oleh negara. Munculnya aktor *non-state* seperti: *non-governmental organization*, *multi-national corporation*, bahkan sampai pada tingkatan seorang individu. Aktor-aktor tersebut kini sangat meramaikan hubungan internasional. Individupun kini menjadi daya tarik tersendiri dalam kajian hubungan internasional ini. Pola hubungan yang melintasi suatu batas negara ini bahkan mampu dilakukan oleh seorang individu yang kini telah menjadi salah satu aktor penting. Kian mudahnya komunikasi lintas negara yang terjalin adalah bawaaan dari globalisasi. Kemudian membawa individu kian mampu untuk berperan sangat aktif dalam fenomena pergolakan di panggung internasional. Individupun akhirnya semakin diakui sebagai salah satu aktor hubungan internasional yang berpengaruh.

Mengangkat sebuah kasus yang berkaitan tentang individu tentu saja akan selalu berkaitan dengan dunia internasional. Telah banyaknya perjanjian internasional yang mengikat individu dalam hal penegakan hak-hak asasi manusia adalah salah satu bukti yang mengikat individu ini dalam pola hubungan international. Pada akhirnya kian aktifnya setiap individu yang bergerak dalam lingkup hubungan internasional membawa poin yang semakin komplit termasuk dalam upaya menjaga penegakan hak dasar individu ini yang harus dipenuhi. Setiap manusia berhak untuk melakoni hidupnya secara aman dan nyaman baik dalam konteks lokal negara termasuk dalam pola hubungan internasional ini. Individu dan hak dasarnya kini menjadi satu kesatuan.

Sejalan dengan pergeseran aktor hubungan internasional ini, pola pemahaman atas keamananpun mulai bergeser. Perwita menyoroti lima dimensi utama keamanan yang diungkap (Benyamin Miller) yaitu: *the origin of threat, the nature of threat, changing respon, changing responsibility of security, core of values of security*, beliau meninjau pergeseran pola keamanan tradisional menuju *human security* dengan membandingkan peristiwa yang terjadi pada masa perang dingin dan pasca peristiwa 11 september 2001.<sup>1</sup> Kondisinya memperlihatkan keamanan zaman sekarang berupa faktor ancaman yang dapat hadir dari pihak domestik maupun global. Keamanan tidak lagi hanya berasal dari persoalan militer, melainkan politik, ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan juga mampu menghadirkan sebuah ancaman. Artinya, pendekatan perwujudan keamanan dapat dimulai dengan memberikan jaminan kepada individu atas nilai-nilai tersebut. Dalam konteks kekinian, keamanan senantiasa harus berhubungan dengan kelangsungan hidup setiap individunya. Hal ini semakin menuntut negara dalam bertanggung jawab memberikan keamanan yang nyata untuk seluruh warga negaranya.

Lebih lanjut Kofi Annan telah menguraikan idenya dalam sebuah *Workshop on Human Security in Mongolia* tahun 2000, yang berkata “*Freedom from want, freedom from fear and the freedom of future generations to inherit a healthy natural environment – these are the interrelated building blocks of human, and therefore national security*”.<sup>2</sup> Hal ini membangun sebuah kondisi yang membawa pemahaman akan *human security* agar dapat lebih diaktualisasi. Keamanan kini berfokus pada seorang individu yang berhak untuk merasa nyaman dan bebas dari rasa takut. Artinya,

---

<sup>1</sup> Anak Agung Banyu Perwita, “*Human Security Dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia*”, *Terrorisme dan Keamanan Manusia*, Analisis CSIS, Jakarta, CSIS, 2003, hal. 71-73.

<sup>2</sup> Jan Van Dijk, 2004. *Human Security: A New Agenda for Integrated, Global Action* melalui website [http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/speech\\_2004-04-01\\_1.html](http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/speech_2004-04-01_1.html) diakses pada tanggal 02 Februari 2013.

setiap warga negara harus bisa merasa nyaman selama hidup di dalam negaranya serta dapat pula hidup tenang dan terhindar dari ancaman baik domestik maupun global.

Dalam kondisi normal seharusnya negara-negara yang menganut paham demokrasi lebih mampu dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, masih saja banyak negara yang kurang mampu dalam menjaga hak-hak warga negaranya. Meskipun negara-negara tersebut terlihat sedang tidak dalam kondisi berkonflik atau dalam kondisi yang damai. *Human security* kini menjadi pandangan untuk melihat kewajiban sebuah negara dalam perwujudan hak-hak warga negaranya. Keamanan manusia ini mulai menjadi simbol utama bagi *national security*, artinya untuk menjaga keamanan negara saat ini tidak hanya berpatokan pada kemampuan militer yang menjaga batas wilayah sebuah negara dari gangguan negara lain.

Sebaliknya, keamanan yang harus dijaga oleh negara dizaman sekarang ini sudah harus menyentuh tataran *human security*. Dengan kata lain, aspek domestik yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara tentunya tanggung jawab nyata sebuah negara atas rakyatnya. Kebijakan pemerintah yang terkadang masih mengesampingkan nilai kemanusiaan akan memberi poin negatif bagi negara tersebut. Melihat kondisi suatu negara yang berada dalam kecaman internasional manakala tidak memperhatikan suatu kemerdekaan atas hak-hak warga negaranya. Pelanggaran yang dinilai atas tindak kemanusiaan tentunya akan mendapat pandangan buruk dari dunia internasional.

Pusat penelitian *Human Security Report Project* merumuskan individu dan *human security* telah mampu mencapai prospek utama dalam pergerakan dunia internasional. Mereka menggambarkan semua pandangan tentang *human security*

sepakat bahwa individu harus menjadi fokus keamanan, seperti yang mereka tuliskan di *website human security group* :

*Supporters of the narrow definition of human security argue for a focus on violent threats to individuals and communities. Supporters of the broad definition outlined in the 1994 HDR argue that hunger, disease, pollution, affronts to human dignity, threats to livelihoods, and other harms in addition to violence should all be considered human security issues.*<sup>3</sup>

Fokus yang digambarkan tersebut semakin mempertegas bahwa *human security* kian menjadi hal paling pokok dalam perwujudan keamanan masa kini. Segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kualitas individu dalam negaranya menjadi tanggung jawab sebuah negara tersebut.

Argumen bahwa individu harus menjadi proyeksi utama dalam penegakan keamanan, membawa individu menuntut kelangsungan hidupnya harus menjadi poin paling penting dalam sebuah negara. Disamping itu didorong oleh banyaknya hak-hak lain, seperti hak memperoleh kesejahteraan, pendidikan, pangan, lingkungan yang aman, beraktifitas ekonomi maupun politik serta sosial dan budaya yang harus dapat terpenuhi. Namun, sangat nyata dilihat dengan masih banyak ketimpangan bagi setiap individu yang belum memperoleh kenyamanan dalam beraktifitas pada sebuah negara tertentu. Demikian halnya dengan Indonesia sebagai entitas negara di dunia, dituntut untuk turut mengapresiasi nilai-nilai keamanan atas individu ini dalam negaranya.

Beberapa prioritas kebijakan yang kini menjadi agenda global *human security* adalah: penyebaran HAM, pencegahan dan penyelesaian konflik komunal, ketidakamanan ekonomi yang diakibatkan pasar bebas, dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup.<sup>4</sup> Namun, sulit untuk melihat kemerdekaan individu pada masyarakat Indonesia, dalam sebuah artikel berjudul "*Pemuda: Kemerdekaan Tanpa Kedaulatan*"

---

<sup>3</sup> HSRG, 2010. *Human Security Backgrounder*, melalui website <http://www.hsrgroup.org/press-room/human-security-backgrounder.aspx> diakses pada tanggal 02 Februari 2013.

<sup>4</sup> Anak Agung Banyu Perwita, *op.cit.*, hal. 73.

di Harian Kompas Online pada 17 Agustus 2010, Ketua FPPI Yogyakarta Denta Julliant Sukma mengatakan,

...terdapat banyak aspek kehidupan bangsa yang belum mencerminkan kemerdekaan, seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam sendiri saja kita tidak punya. Tidak ada kemerdekaan tanpa kedaulatan sumber daya alam.<sup>5</sup>

Masih banyaknya masalah domestik yang masih belum mampu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia memperlihatkan kurangnya upaya dalam mewujudkan keamanan manusia dalam negerinya.

Diberitakan di BBC Online, "*Dua Terduga Teroris Ditembak Mati di SulSel*" pada 4 Januari 2013. Mabes Polri menyebut keduanya terlibat dalam jaringan terorisme Poso yang diduga terkait aksi kekerasan terhadap aparat kepolisian di wilayah itu. Polisi kemudian menembak mati kedua terduga tersangka tersebut, dikarenakan melakukan perlawanan.<sup>6</sup> Memperlihatkan sebuah kasus bahwa hanya karena diduga terkait dengan teroris aparat penegak hukum kini dapat langsung menghukum orang tersebut. Selanjutnya, Harian Tempo Online pada 16 Januari 2013 memberitakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menuding Polri, lewat Detasemen Khusus 88 Antiteror, melanggar hak asasi manusia berupa kekerasan kepada masyarakat dan teroris itu sendiri. Komnas HAM mendesak pemerintah mengevaluasi kinerja Detasemen, bahkan komnas menilai langkah Detasemen menimbulkan perasaan waswas dimasyarakat.<sup>7</sup> Kedua pemberitaan ini memperlihatkan elemen penegak hukum kurang melihat suatu hak dasar hidup individu. Dimana kerap kali penegak hukum yang memberikan efek

---

<sup>5</sup> Mohamad Final Daeng, 2010. *Pemuda : Kemerdekaan Tanpa Kedaulatan*, melalui website <http://regional.kompas.com/read/2010/08/17/20011095/Pemuda.Kemerdekaan.Tanpa.Kedaulatan> diakses pada tanggal 02 Februari 2013.

<sup>6</sup> \_\_\_\_\_, 2013. *Dua terduga teroris ditembak mati di Sulse*, melalui website [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/01/130104\\_teroris\\_sulse\\_ditembak.html](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130104_teroris_sulse_ditembak.html) diakses pada tanggal 02 Februari 2013.

<sup>7</sup> \_\_\_\_\_, 2013. *Densus Dituding Langgar HAM, Polri Pasang Badan*, melalui website <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/16/063454834/Densus-Dituding-Langgar-HAM-Kapolri-Pasang-Badan.html> pada tanggal 02 Februari 2013.

rasa takut terhadap manusia disekitarnya, bukannya memberi rasa aman dan nyaman dalam penanganan isu-isu keamanan ini. Pemerintah umumnya selalu memperoleh legitimasi untuk menggunakan kekuatan, dengan mengklaim kekuasaan eksekutif atas hak-hak sipil yang biasa dinikmati oleh warga negara dalam kondisi normal, namun mengesampingkan proses keterbukaan, konsultasi dan demokrasi.<sup>8</sup> Hal ini yang membawa nilai kemanusiaan di Indonesiapun sering diabaikan oleh pemerintah yang mengatur hak dalam masalah *human security* ini.

Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah disebabkan dari kurang berprestasinya pemerintah dalam menjaga wujud *human security* dalam negerinya. Pada Harian Kompas Online 29 Januari 2013 ditulis, hingga Januari 2013 hanya 35,91 persen yang mengaku puas atas kepemimpinan SBY, berbeda dengan survey terakhir yang dilakukan LSI pada Juni 2011 yang mencapai 47,2 persen. Selanjutnya, Ardian Sopa peneliti LSI mengatakan, “Tahun 2013 adalah tahun terakhir bagi SBY untuk membuat kebijakan yang baik dan kokoh.”<sup>9</sup> Trend buruk Pemerintah Indonesia dalam mengelola negara menjadi fokus utama penulis dalam melihat masalah *human security* di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjukkan kepedulian penuh kepada setiap warga negaranya guna membawa aspek *human security* dalam kehidupan bangsa ini.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, memiliki daya tarik sendiri dalam perkembangan dunia internasional saat ini. Faktanya demokrasi dan penegakan HAM yang berjalan di Indonesia belum menjamin akan adanya penegakan atas *human security* seutuhnya. Faktor pluralitas yang terjadi di Indonesia kian

---

<sup>8</sup>Landry Haryo Subianto, “Konsep *Human Security*: Tinjauan dan Prospek”, *Isu-Isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*, Analisis CSIS, Jakarta, CSIS, 2002, hal. 110-111.

<sup>9</sup> Sandro Gatra, 2013. *Kepuasan Terhadap Kepemimpinan SBY Turun*, melalui website <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/29/16581310/Kepuasan.terhadap.Kepemimpinan.SBY.Turun.html> diakses pada tanggal 02 Februari 2013.



mempersulit dalam mewujudkan *human security* ini. Perbedaan yang membangun tiap individu yang ada di negara tersebut merupakan hal yang sangat sulit untuk diwujudkan dalam satu kesatuan kebijakan nyata untuk kebaikan semua individu yang hidup didalamnya.

Pola Pemerintah Indonesia dalam menjaga kemerdekaan individu setiap warga negaranya yang kurang dibahas, sebagai dasar bagi penulis untuk memilih judul **“Hakekat Kemerdekaan Individu Dalam Kerangka *Human Securty* di Indonesia”**. Walaupun demokrasi di Indonesia sebagai salah satu bukti yang diakui di dunia internasional, namun dunia kian jauh ingin melihat individu di Indonesia lebih dapat ditegakkan dalam *human security*.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Mengingat masih samarnya istilah tentang kemerdekaan individu, maka penulis menetapkan batasan masalah pada perwujudan kemerdekaan individu dalam negeri Indonesia dengan melihat kondisi pemerintah Indonesia dalam menjaga kesejahteraan warga negaranya guna memberikan jaminan atas penegakan hak-hak dasar warga negaranya tersebut. Penulis melihat sebuah masalah pokok yang masih terjadi di Indonesia berkaitan dengan penegakan kemerdekaan individu dalam kerangka *human security*. Akhirnya, penulis menitikberatkan dua pertanyaan pokok sebagai rumusan masalah, yaitu :

- 1) Apa yang menjadi hakekat kemerdekaan individu di Indonesia?**
- 2) Bagaimana wujud kemerdekaan individu tersebut di Indonesia?**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui substansi kemerdekaan individu dalam pemahaman Indonesia yang menyangkut *human security*.
- 2) Untuk memberikan analisa tentang hakekat kemerdekaan individu dalam kerangka *human security* di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran untuk referensi ilmiah bagi setiap penstudi ilmu hubungan internasional, khususnya yang menitikberatkan pada kemerdekaan individu dan *human security*.
- 2) Memberikan sumbangan referensi bagi stakeholder pembuat kebijakan di Indonesia tentang masalah penanganan *human security* guna mendorong pemerintah dalam upaya menjaga kemerdekaan individu.

### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk melihat sebuah tulisan ilmiah, diperlukan landasan teori dan konsep yang jelas dalam penulisannya. Teori maupun konsep yang digunakan menjadi pijakan dasar penulis untuk menganalisa data dan fakta yang diperoleh. Sangat diperhatikan agar teori maupun konsep yang digunakan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan. Guna memberikan suatu tulisan yang berkualitas dan bermanfaat untuk referensi kedepannya.

Negara dan individu di dalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Negara adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>10</sup> Artinya satu syarat diakuinya sebuah negara adalah adanya individu atau masyarakat yang berinteraksi dan siap menaati

---

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.8.

aturan yang berlaku didalamnya. Negara dan individu merupakan aktor hubungan internasional yang memiliki perannya masing-masing. Dikatakan sebelumnya negara memiliki tanggung jawab besar atas rakyatnya. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mampu menjaga kualitas hidup individu di dalamnya.

Asumsi ini membawa penekanan akan kemerdekaan individu tetap harus dapat ditegakkan dalam kondisi normal suatu negara yang sedang tidak dalam beban konflik. Seringkali negara lupa dalam upaya menjamin hak setiap warga negaranya. Pergeseran pola keamanan yang tidak saja hanya sebatas mempertahankan wilayah kedaulatan, mulai lebih mengikat negara untuk senantiasa dapat konsisten menjaga *human security*.

Indonesia sebagai negara yang berbasis demokrasi sudah sewajarnya patut menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam negerinya. Pluralitas dalam negeri Indonesia seharusnya mampu dikoordinir secara matang guna menjaga nilai kemanusiaan tersebut. Dikarenakan beban yang telah diamanatkan oleh landasan konstitusional negara ini, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan :

..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam landasan tersebut sangat jelas menggambarkan sejak negara ini merdeka telah berupaya dalam menjaga kualitas hidup warga negaranya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial untuk seluruh rakyatnya, mengamanatkan dengan tegas bahwa kemerdekaan individu di dalam negeri ini sudah sepatutnya dapat dijaga. Nilai-nilai kemanusiaan ini telah disepakati bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam

Pancasila. Individu harus diberlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki akal budi, kehendak, kebebasan serta penghormatan atas hak-hak asasinya.<sup>11</sup>

Sejalan dengan Indonesia, fenomena duniapun kini mulai menitikberatkan keamanan pada *human security*. Pergeseran makna keamanan yang mulai berada pada takaran keamanan manusia setidaknya dimulai sejak “*The 1994 Report on Human Development pointed out the need of a profound transition in thinking from nuclear security to human security*”.<sup>12</sup> Bukti yang menunjukkan bahwa dunia telah mulai melihat prospek *human security*. Akhirnya *Human Development Report 1994*, membawa pemahaman kepada dunia akan pentingnya keamanan manusia ini, dengan menjelaskan bahwa :

*The Report defined human security based on two principal aspects: "It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hutful disruptions in the patterns of daily life -whether in homes, in jobs or in communities."*<sup>13</sup>

*HDR 1994*, ini cukup membuka mata dunia akan perlunya pemahaman *human security* ini. Seakan mengawali pergeseran pola keamanan yang makin menyusut pada tingkatan aktor terkecil dalam hubungan internasional yaitu tentang keamanan manusia. Menjelaskan *human security* ini merupakan sesuatu yang amat penting karena semua persoalan yang dapat mengganggu kehidupan manusia dapat dikategorikan sebagai suatu ancaman keamanan. Mengajak setiap komponen dalam pola kehidupan bernegara kini harus lebih dapat menghargai setiap ancaman keamanan yang dapat mengganggu stabilitas hidup masing-masing individu di dalamnya.

---

<sup>11</sup> Tonny d. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2004, hal. 5.

<sup>12</sup> UNTFHS, 2010. *What is human security? (Inter-Amecian Institute of HR)*, melalui website [http://www.iidh.ed.cr/multic/default\\_12.aspx?contentidoid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c3391de83fb42&Portal=IIDHSeguridad EN#Background](http://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contentidoid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c3391de83fb42&Portal=IIDHSeguridad EN#Background) diakses pada tanggal 02 Februari 2013.

<sup>13</sup> *ibid*

*United Nation Definitions* tentang keamanan manusia, sebagaimana dijelaskan Kofi Annan melalui *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia* tahun 2000 telah mengatakan bahwa:

*..., Human security, in its broadest sense, embraces far more than the absence of violent conflict. It encompasses human rights, good governance, access to education and health care and ensuring that each individual has opportunities and choices to fulfill his or her potential. Every step in this direction is also a steep towards reducing poverty, achieving economic growth and preventing conflict, ...*<sup>14</sup>

Realitas ini memperlihatkan bahwa setiap fokus yang dijalankan akan terus berpatokan pada individu untuk melihat norma dalam *human security* itu sendiri. Bahwa setiap individu memiliki potensinya masing-masing untuk memenuhi pilihannya. Hak untuk melangsungkan kehidupan, memperoleh kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan banyak hal lainnya terlepas dari tidak adanya tindak kekerasan ataupun konflik. Memberikan pemahaman tentang penekanan atas pola keamanan manusia.

Landasan konstitusional Indonesia yang meyakini perlunya kemerdekaan individu dalam negerinya dan pola pemahaman tentang *human security* yang berupaya ditegakkan, menjadi fokus penulis. Sejauhmana keterkaitan *human security* di Indonesia akan dilihat dalam perwujudan kemerdekaan individunya.

## **E. Metode Penelitian**

### **a) Tipe Penelitian**

Dalam hal ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Analisis deskriptif yang penulis gunakan untuk menjelaskan hakekat kemerdekaan individu dan *human security* dalam negeri Indonesia.

---

<sup>14</sup> *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia, Two-Day Session in Ulaanbaatar, May 8-10, 2000*, melalui website <http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html> diakses pada tanggal 02 Februari 2013.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka atau *library research*, yaitu cara pengumpulan data teoritis dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar dan artikel yang berhubungan dengan objek penulisan. Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh dari penelusuran dokumen terkait melalui internet dan melalui beberapa tempat yang penulis telah kunjungi, yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia,  
Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta
- b. Perpustakaan Pusat LIPI di Jakarta.
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Makassar

c) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana penulis akan menjelaskan permasalahan berdasarkan data teoritis yang diperoleh dengan tetap melihat fakta aktual yang terjadi dalam fenomena objek penulisan. Sedangkan, data kuantitatif digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif.

d) Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis merupakan metode deduktif, dimana penulis memulai pembahasan dengan menggambarkan masalah secara umum, lalu kemudian memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang terlebih dahulu telah digambarkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Tentang Kemerdekaan Individu**

Individu yang menjalani kesehariannya dalam kehidupan ini setidaknya telah memiliki hak dasarnya masing-masing. Hak masing-masing individu bahkan telah berupaya dijaga dalam pola hubungan internasional dengan beragam perjanjian internasional yang secara universal harus dianut setiap negara untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tersebut. Bahwa setiap individu yang terlahir ke bumi adalah karunia dari Sang Pencipta, maka tidak berhaklah bagi seorang individu untuk merusak kenyamanan kehidupan individu lainnya. Setiap individu dasarnya harus memegang teguh kemerdekaannya masing-masing.

Individu yang merdeka menjadi acuan bersama dalam hubungan internasional kekinian. Setidaknya setiap individu bebas untuk melakukan banyak hal tanpa harus diganggu oleh individu lainnya. Bebas dalam artian yangmana berada dalam takaran aturan tertentu, dan juga tidak melanggar norma yang berjalan secara umum dalam masyarakat. Individu bahkan kian jauh mengenal lingkungan internasional yang membawanya dalam ikatan secara universal masa kini. Akhirnya terobosan paling menggairahkan memasuki abad ke-21 justru terjadi bukan karena teknologi, tetapi perkembangan mengenai konsep apa artinya menjadi manusia.<sup>15</sup>

Menjadi manusia dalam hal ini berupaya mengenal sejauh mana kini manusia dapat bergerak dengan sangat bebasnya hingga lingkup internasional. Perlunya melindungi setiap gerak yang dilakukan oleh setiap individu seakan menjadi proyek

---

<sup>15</sup> Tonny d. Widiastono. *op.cit.*, hal. 3

bersama dunia dalam menjaga martabat seorang manusia. Ini dibuktikan sejak berakhirnya PD II saat dunia mulai membentuk wadah PBB sebagai proyek bersama negara-negara dalam menjaga perdamaian dunia. Mengingat luka akibat perang, para pemimpin dunia bahkan memutuskan untuk melengkapi Piagam PBB tersebut dengan jalan untuk menjamin hak-hak setiap individu dimana-mana.<sup>16</sup>

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948* seakan menjadi wadah awal yang mengikat seluruh dunia dalam upaya penegakan hak-hak dasar setiap individu. Kini proyeksi penegakan HAM menjadi salah satu agenda utama dunia. Bagaimana seluruh negara yang ada dapat menjaga hak setiap warga negaranya. Bahkan beban hak hidup dan kesejahteraan warga negara adalah tanggung jawab sebuah negara. Kemerdekaan individu kian erat kaitannya dalam universalitas HAM yang ditegakkan di dunia internasional. Pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* mengatakan:

*Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, ...*<sup>17</sup>

Memberi pemahaman bahwa manusia memiliki martabat dan derajat sama yang menjadi dasar sebuah keadilan, kesetaraan, dan untuk kemerdekaan setiap individu agar terciptanya suatu perdamaian dunia. Menyuarakan banyak hal tentang *freedom* adalah agenda utama untuk mewujudkan suatu kemerdekaan individu. Bebas yang artinya individu dapat berjalan nyaman karena menjadi tanggung jawab negara dan dunia.

---

<sup>16</sup> United Nations, 2013. *The Universal Declaration of Human Rights*, melalui website <http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml> diakses pada tanggal 25 Mei 2013.

<sup>17</sup> *ibid.*



Dalam “Laporan Penelitian: *Deklarasi Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Segi Pancasila dan UUD 1945 Atas Dasar Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah Yang Maha Esa*”, Meriam Budiardjo mengungkapkan timbulnya keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia dalam suatu naskah internasional, dikarenakan pengamatan menunjukkan bahwa dalam perang yang hampir melibatkan seluruh dunia, hak asasi itu dikesampingkan.<sup>18</sup> Dengan kata lain, sebab utama mulai dirumuskannya *Universal Declaration of Human Rights* dikarenakan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan semasa perang. Dalam artian selama perang berlangsung sama sekali individu yang satu dengan individu yang lainnya saling tidak melihat kodratnya masing-masing yang terlahir sama sebagai seorang manusia, dikarenakan perang yang menghancurkan.

Walau pada awal perumusan *Universal Declaration of Human Rights* dan masa dimana ini mulai diaplikasikan harus melalui proses cukup sulit untuk menyentuh seluruh tataran negara yang ada. Namun, *UDHR* terus berkembang dalam lingkup PBB dengan niat baik dengan berusaha terus dapat menjaga perdamaian dunia yang akhirnya semakin memperkokoh upaya dunia dalam menegakkan kemerdekaan individu. *UDHR 1948* yang menjadi *Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* pada tahun 1966 harus mendapatkan perhatian lebih oleh dunia atas kesepakatan bersama kala itu. Dikarenakan dengan berubahnya status dari *declaration* menjadi *covenant*, maka hak asasi manusia kian memperoleh sifat ‘hukum’.<sup>19</sup> Status hukum yang mengikat secara universal kian mengikat dunia dalam kesepakatan atas perlunya penegakan HAM ini. Dengan kata lain, negara yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tentu akan berurusan dengan dunia internasional.

---

<sup>18</sup> Tim Pengkajian Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta, *Deklarasi Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Segi Pancasila dan UUD 1945 Atas Dasar Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah Yang Maha Esa*, dalam “Laporan Penelitian: Edisi Mimbar Ilmiah”, FH UID, Jakarta, 1994, hal. 68.

<sup>19</sup> *ibid.* hal.73

Kemerdekaan individu dan sebuah negara adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan kini. Individu atau rakyat menjadi tanggung jawab negara seperti dikatakan sebelumnya. Artinya setiap penentu kebijakan dalam sebuah negara haruslah selalu mempertimbangkan untuk mengakomodir seluruh rakyat atau individu dalam negara tersebut. Kebebasan yang dimiliki seorang individu secara nyata telah diikat oleh beragam perjanjian internasional seperti deklarasi universalitas HAM. Namun, masih saja ditemukan negara-negara yang masih kurang mengupayakan dalam menjaga penegakan HAM ini. Padahal pola penegakan HAM ini bisa menjadi tolak ukur perwujudan kemerdekaan individu dalam suatu negara. Kita bisa melihat seberapa jauh sebuah negara mampu menjaga hak-hak dasar yang dimiliki setiap rakyatnya.

Tibor R. Machan dalam bukunya menjelaskan:

Hak asasi manusia dianggap mencakup hak untuk hidup baik dan bebas. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan menjadi paling mendasar bagi kehidupan individu ini. Dengan adanya hak-hak tersebut setiap individu punya ruang lapang untuk mengambil keputusan pribadinya yang dituntun oleh nurani dan pengaruh sosial tanpa niat kekerasan, sehingga individu dapat bekerja produktif dan kreatif.<sup>20</sup>

Hak asasi manusia yang tadinya dirumuskan secara global oleh pemimpin dunia kini mulai memasuki takaran peran lokalnya dalam sebuah negara. Permasalahan nilai kemanusiaan yang telah terintegrasi secara internasional kian memaksa negara untuk berjuang bersama dalam penegakan HAM ini. Beliau menambahkan, pemerintah hanya menjaga jangan sampai ada orang lain yang menyentuh kekuasaan pribadi seseorang, serta menjamin dihormatinya hak-hak pribadi itu untuk tujuan damai.<sup>21</sup> Artinya sangatlah benar manakala negara dituntut untuk bekerja sama dalam menjaga kemerdekaan individu.

---

<sup>20</sup> Tibor R. Machan, "Gagasan Tentang Masyarakat Bebas", dalam *Kebebasan dan Kebudayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal. 60.

<sup>21</sup> *ibid.*

## B. Konsep Tentang *Human Security*

Secara umum, keamanan pada awalnya akan selalu berkaitan dengan adanya ancaman yang datang dengan menyentuh sensitifitas sebuah negara. Dikarenakan selalu dipersepsikan sebagai bentuk gangguan langsung dan dapat berbahaya terhadap kedaulatan, integritas, dan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>22</sup> Negara akhirnya selalu berkewajiban dalam menjamin keamanan nasional dengan penggunaan kekuatan militer dalam perjuangan teritorial sebuah negara tersebut. Namun, dalam tesis Mustafa Fakhri, yang berjudul, “*Hak Asasi dan Keamanan Manusia (Analisi Hukum Pidana Mahkamah Konstitusi Pengujian UU Anti-Terrorisme dalam Perspektif Human Security)*”, keamanan manusia yang diuraikan sebelumnya sejalan dengan yang diungkapkan Buzan, bahwa aspek ini sebagai bagian fundamental dari keamanan yang harus dijamin oleh negara dan terkadang menjadi subordinasi dari keamanan nasional itu sendiri.<sup>23</sup>

Perubahan persepektif atas nilai keamanan ini setidaknya terjadi pada akhir abad ke-20 telah dipengaruhi oleh 3 faktor seperti yang diungkap Nasir Tamara, diantaranya :

Suatu perasaan bahwa perang besar dan penggunaan senjata nuklir oleh militer akan menghancurkan; Meningkatnya fakta-fakta bahwa keamanan manusia dari negara-negara di dunia merupakan tantangan tersendiri dan berkembang menjadi ancaman transnasional; Suatu perasaan bahwa proses perubahan global akan memperkuat ancaman transnasional dan mengurangi ancaman konvensional.<sup>24</sup>

Faktor ini lebih mengarahkan negara mulai melihat kewajiban bersama dalam upaya perwujudan perdamaian dunia, terlebih setelah *United Nations* itu terbentuk. Mengingat selama abad ke-20 tersebut masih diramaikan oleh perang dalam tingkat luas bahkan penggunaan senjata nuklir oleh militer. Perasaan global yang akhirnya banyak melihat

---

<sup>22</sup> Mustafa Fakhri, *Hak Asasi dan Keamanan Manusia (Analisi Hukum Pidana Mahkamah Konstitusi Pengujian UU Anti-Terrorisme dalam Perspektif Human Security)*, Tesis, FH-Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal 110-111.

<sup>23</sup> *ibid.*

<sup>24</sup> Nasir Tamara, *Konsep Human Security dan Hak Hidup*, paper dipresentasikan di Makassar pada tahun 2006.

tentang pentingnya nilai kemanusiaan dalam mengupayakan sebuah perdamaian menjadi salah satu dasar utama.

Keamanan manusia merupakan salah satu konsep dari *security*. Keamanan yang dahulu selalu dikaitkan dengan teritorial, kian mengalami perubahan yang cukup jauh seiring dengan perjalanan dunia internasional yang semakin kompleks. Kian dekatnya pola hubungan internasional yang dibawah oleh dampak globalisasi menjadi penyokong utama hadirnya konsep-konsep yang semakin spesifik. Globalisasi membawa dunia semakin terintegrasi satu dengan yang lainnya. Membuat kebijakan yang akan diambil sebuah negara akan selalu terikat dengan pihak internasional. Globalisasi secara langsung membawa pemahaman baru yang lebih spesifik tentang keamanan manusia.

Lahirnya fokus terhadap keamanan manusia, tidak lepas dari *HDR 1994* yang telah diungkap sebelumnya. *United Nation on Development Programme* (UNDP) melalui *HDR 1994* telah mengungkapkan bahwa yang menjadi fokus dunia saat ini akan menyentuh takaran keamanan manusia. Setiap gangguan terhadap kualitas hidup masing-masing hidup dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman keamanan terhadap manusia. Dalam sebuah artikel berjudul “*Globalisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Keamanan Manusia di Asia Pasifik : Kasus China dan Papua Nugini*”, Maclean telah mengutarakan, “keamanan manusia adalah konsep mengenai perlindungan terhadap individu atas ancaman politik dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera”.<sup>25</sup> Lebih lanjut, ancaman politik ini dimaksudkan berupa kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap individu maupun kesempatan hidup sejahtera tercermin pada akses individu atas lingkungan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ulil Amri, “Globalisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Keamanan Manusia di Asia Pasifik : Kasus China dan Papua Nugini”, *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol.2, Jakarta, LIPI, 2011, hal. 58.

<sup>26</sup> *ibid*

Konsep *Human Security* dan hak hidup yang telah diungkapkan oleh Nasir Tamara dalam sebuah seminar di Makassar pada tahun 2006 menjelaskan tentang :

*Human Security* adalah perlindungan terhadap kebebasan yang sangat vital. Hal ini berarti melindungi manusia dari berkembangnya ancaman dan situasi kritis, serta membangun diatas kekuatan dan aspirasi mereka. Keamanan manusia ini juga berkaitan dengan berbagai jenis kebebasan seperti bebas berkehendak, bebas dari rasa takut, bebas untuk bertindak atas nama sendiri.<sup>27</sup>

Keamanan manusia ini terus menggambarkan tentang pentingnya suatu kebebasan atas setiap individu. Kini semua kategori ancaman yang datang terhadap individu akan dinilai sebagai ancaman keamanan. Banyak para ahli seperti Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek diluar gangguan internasional sebagai kajian keamanan misalnya masalah kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya sebagai bagian dari studi keamanan.<sup>28</sup> Semakin jauh kita mencoba melihat aspek ancaman keamanan manusia, akan semakin tertuju pada prospek kinerja sebuah negara atas tanggung jawabnya terhadap rakyatnya.

Dalam tesis Mohammad Irham yang berjudul "*Isu Polusi China Dalam Hubungan China-Jepang : Perspektif Human Security (2001-2008)*" ditemukan bahwa Barry Buzan telah mengatakan, "teori keamanan kali ini tidak terbatas hanya pada keamanan yang bersifat militer saja, melainkan juga bersifat ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan".<sup>29</sup> Hal ini telah sejalan dengan *HDR 1994 UNDP* yang sangat jelas menawarkan kepada dunia tentang konsep baru keamanan tersebut. Memberikan pendekatan baru dalam melihat isu-isu keamanan non-konvensional seperti masalah keamanan manusia ini. *UNDP* bahkan lebih nyata berupaya membawa konsep keamanan manusia ini agar tidak dikaitkan dengan konsep keamanan nasional yang

---

<sup>27</sup> Nasir Tamara, *op.cit.*

<sup>28</sup> Mohammad Irham, *Isu Polusi China Dalam Hubungan China-Jepang : Perspektif Human Security (2001-2008)*, Tesis, FISIP-Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal 16.

<sup>29</sup> *ibid.*

lebih banyak diartikan sebagai ancaman dari dunia luar dan lebih menyentuh permasalahan wilayah kekuasaan sebuah negara. Namun, tetap saja nilai atas keamanan manusia ini akan menjadi tanggung jawab negara.

Dalam sebuah artikel berjudul “*Isu-Isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*”, ditemukan bahwa Buzan kembali menegaskan, “karena negara memegang posisi akan tanggung jawab keamanan manusia, maka negara dapat mengklaim hak-hak kelangsungan hidup individu dan hak-hak sebagai individu warga negaranya”.<sup>30</sup> Hal ini akan terus dapat dikaitkan dengan proses pencapaian HAM suatu negara. Standarisasi pemenuhan hak hidup individu terkait adalah salah satu capaian target keamanan manusia itu. Dalam artikel yang sama disebutkan diatas, Kofi Annan juga menerangkan bahwa, “dunia tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan sistematis sehingga menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang amat menyakitkan”.<sup>31</sup>

Dalam tataran global, fokus utama pencapaian keamanan manusia telah menuntut agenda perubahan-perubahan pembangunan baik secara nasional maupun internasional. Dikarenakan isu kemanusiaan yang marak disuatu negara akan membawa perhatian aktor negara maupun aktor non-negara lainnya untuk dapat tanggap terhadap permasalahan tersebut. Negara yang berkendala dengan masyarakatnya terkait kesehatan, kemiskinan, akses pangan, degradasi lingkungan, ancaman fisik personal, ancaman berkelompok atau entitas, serta kebebasan hak-hak dasar atas individu, akan dinilai sebagai sebuah ancaman atas keamanan manusia. Akhirnya, keamanan manusia ini dinilai sebagai salah satu target utama yang harus dijaga masing-masing negara,

---

<sup>30</sup> Landry Haryo Subianto, *op.cit.*, hal.112.

<sup>31</sup> *ibid.*

### BAB III

#### IDENTIFIKASI KEMERDEKAAN INDIVIDU DAN *HUMAN SECURITY*

##### A. Kemerdekaan Individu

Kemerdekaan individu yang menjadi salah satu fokus dunia saat ini dititikberatkan pada upaya menjaga nilai kemanusiaan yang berlaku secara internasional. Melihat dunia sangat memandang aktor *non-state* yang banyak terfokus pada individu. Kondisi hubungan internasional yang terjalin senantiasa harus terus menjaga komitmen bersama dalam melindungi hak-hak dasar setiap individu. Setidaknya dunia telah banyak membangun perjanjian internasional dalam upaya penegakan nilai kemanusiaan tersebut. Penulis menilai kemerdekaan individu akan sangat berkaitan dengan proyek menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

##### 1. Landasan Konstitusional

Sejarah telah mencatat banyak peristiwa yang sangat menilai tinggi hak dasar seorang manusia. *Magna Charta 1215* yang pernah lahir di Inggris kala itu adalah sebuah piagam yang mencoba membatasi kekuasaan raja. *Declaration L'Home Et Du Citoyen 1789* yang lahir di Perancis adalah sebuah deklarasi yang mengupayakan sebuah penegakan persamaan derajat seluruh rakyat Perancis kala itu dan penegakan kesamaan kedudukan dalam hukum warga yang berlaku. *Bill Of Rights* yang lahir di Amerika Serikat merupakan suatu piagam untuk menegaskan pentingnya hak asasi itu untuk ditegakkan. Menjunjung nilai kemanusiaan sebagai hal paling dasar dalam berkehidupan di Amerika Serikat. Catatan sejarah ini setidaknya memberikan pemahaman bahwa sejak dahulu dunia sebenarnya ingin melihat jauh akan pentingnya sebuah kemerdekaan individu ini.

Dasar kesamaan dari beberapa piagam tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan raja atau pemimpin seharusnya dapat dibatasi dan memperlihatkan hak asasi itu lebih penting daripada raja. Dalam perspektif modern saat ini negara memegang tanggung jawab penuh dalam menjaga stabilitas dalam negerinya. Artinya negara harus berpegangan dalam takaran hukum yang dianut untuk mengupayakan sebuah kesetaraan hak-hak asasi manusia yang telah dianut bersama secara internasional. Kemerdekaan individu disini akan digambarkan dalam proses menjaga nilai HAM dalam sebuah negara. Tanggung jawab negara akan dituntut dalam menjamin kualitas hidup warga negaranya atau kehidupan pribadi setiap individu harus mendapat jaminan dari pemerintahnya.

Hukum internasional atas HAM sangat mengupayakan memberikan perlindungan yang mengikat secara internasional bagi setiap negara untuk menjaga HAM atas individu oleh sebuah pemerintahan negara. Negara dalam hal ini akan berurusan langsung dengan dunia internasional saat HAM dalam sebuah negara tidak dapat berjalan semestinya. Setidaknya instrumen-instrumen HAM secara internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaannya adalah negara.<sup>32</sup> Dalam konteks tersebut negara telah berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM ini. Akhirnya HAM yang mengikat setiap individu kini akan terus dikaitkan dengan proyeksi perjalanan masing-masing negara. Setidaknya penyebaran nilai-nilai HAM dalam skala internasional dapat diyakini sebagai upaya penuh yang dilakukan untuk menjaga nilai kemerdekaan individu.

---

<sup>32</sup> Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM Indonesia dan AusAID, Jakarta, hal. 7-10.



Ketentuan hukum HAM ini telah memberikan 3 penegasan tugas utama negara, antara lain:

Pertama, menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM (*dutyholder*) baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*right holder*). Kedua, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional. Ketiga, jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara dikatakan melanggar HAM.<sup>33</sup>

Penegasan akan tugas utama negara ini yang telah disepakati bersama dalam upaya penyebarluasan nilai-nilai HAM di panggung internasional. Semakin mengikat negara untuk terus dapat mengupayakan menjaga kualitas hidup individu di dalam negaranya dengan menegakkan hak-hak paling mendasar bagi setiap manusia. Sebagai konsekuensi setiap negara yang telah meratifikasi kesepakatan instrumen-instrumen HAM internasional yang diadaptasi ke dalam negerinya, membuat negara tersebut semakin dituntut untuk memelihara kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pengaplikasian nilai-nilai HAM.

Dunia mengawali keinginannya untuk lebih dapat mengapresiasi nilai kemanusiaan, dikarenakan sejarah buruk yang dilalui semasa perang. Perang Dunia yang melibatkan banyak negara setidaknya telah mengakibatkan banyak dampak kehancuran terhadap kondisi dunia kala itu. Termasuk jatuhnya banyak korban bernyawa. Dalam kondisi perang negara saling memperebutkan kepentingannya masing-masing dengan mengandalkan kemampuan militer untuk penghancuran tanpa memikirkan dampak lainnya. Negara sebagai aktor utama kala itu tanpa pikir panjang dapat sesuka hatinya merenggut nyawa manusia di negara lawannya secara massal demi memenuhi kepentingan negaranya.

---

<sup>33</sup> *ibid.*

Namun, diakhir masa Perang Dunia II setelah Amerika Serikat memenangkan perang, mulai memberikan pemahaman akan pentingnya sebuah nyawa manusia. Dalam hal ini perlunya melihat hak-hak paling mendasar yang dimiliki setiap individu yang bernyawa. Lahirnya PBB sebagai wadah bersama panggung internasional dalam mengupayakan menjaga perdamaian dunia, lebih jauh banyak negara juga mulai melihat tentang optimisme penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Mencoba melupakan kenangan pahit semasa perang yang tidak mempedulikan nyawa setiap individu. Negara hanya terus memfokuskan proyeksi kepentingan nasional diatas segala-galanya. Bersatunya banyak negara dalam PBB semakin mempererat keinginan bersama untuk mulai menjunjung bersama tentang pentingnya mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan secara nasional dan internasional. Kemerdekaan individupun mulai mendapat perhatian lebih oleh dunia

*UDHR 1948* membuktikan langkah awal negara-negara yang tergabung dalam PBB kala itu untuk secara universal dapat melihat standar instrumen HAM yang dapat dianut langsung di panggung internasional. Ini adalah keinginan bersama banyak negara yang mulai mengapresiasi pentingnya nilai kemanusiaan tersebut. Instrumen HAM internasional ini mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan spesifik. *UDHR 1948* sebagai deklarasi awal atas keinginan bersama menegaskan perhatian terhadap nilai kemanusiaan. Dalam deklarasi tersebut terkandung 30 pasal yang mengatur tentang hak pribadi, hak kelompok, hak sipil, hak ekonomi-sosial, hak sosial internasional, demokrasi, dan hak kebebasan. Semua hak-hak ini tidak lain untuk mendukung HAM secara universal.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> United Nations Documents. *The Universal Declaration of Human Rights*, melalui website <http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml> diakses pada 25 Mei 2013.

*International Covenant on Civil and Political Rights 1966* sebagai tahapan perkembangan dari *UDHR 1948* semakin memperluas jangkauan instrumen HAM internasional. Sebuah konstitusi yang akan semakin mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam pola hubungan antar negara ini. Dalam *covenant* ini diungkapkan,

*The States Parties to the present Covenant, Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person ...*<sup>35</sup>

Memperlihatkan suatu gambaran yang semakin mempertegas bahwa hak-hak tersebut adalah martabat yang melekat pada seorang manusia. Terus mengingatkan kewajiban negara-negara dalam ketaatan atas penghormatan universalitas HAM, serta menyadarkan setiap individu bahwa setiap kewajiban dan tanggung jawabnya telah diikat oleh kovenan ini dalam penegakan hak-hak secara universal pula. Dalam kovenan ini terkandung 53 pasal yang mengatur tentang hak-hak individu dalam ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan status politik.

Fase perkembangan dari *UDHR* hingga memasuki *Covenant* adalah sebuah keinginan bersama masyarakat dunia yang semakin meningkatkan status hukum yang mengikat atas penegakan universalitas HAM. Status hukumnya akan mengarahkan negara untuk dapat mengupayakan HAM secara nyata dalam wilayahnya. Dikarenakan, manakala negara lalai dalam penegakan HAM dipastikan akan mendapatkan sanksi. Negara bahkan individu kini semakin dituntut dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya atas universalitas HAM ini. Setiap individu diajak untuk saling menjaga martabat yang melekat pada insan individu.

---

<sup>35</sup> United Nations Documents. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, melalui website <http://www.un-documents.net/iccpr.html> diakses pada 25 Mei 2013.

*Declaration On The Rights To Development 1986* merupakan perkembangan lebih lanjut untuk melihat apresiasi yang ingin diberikan pada nilai kemanusiaan ini.

Dalam deklarasi ini diungkapkan,

*... Recognizing that the human person is the central subject of the development process and that development policy should therefore make the human being the main participant and beneficiary of development. Recognizing that the creation of conditions favourable to the development of peoples and individuals is the primary responsibility of their States. Aware that efforts at the international level to promote and protect human rights should be accompanied by efforts to establish a new international economic order. Confirming that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations ...*<sup>36</sup>

Deklarasi ini ingin menunjukkan hak-hak individu adalah bagian kehidupan dalam berbangsa. Terdapat 10 pasal yang mengikat seluruh negara yang meratifikasi agar pembangunan yang dilakukan negara tersebut akan terikat oleh status pembangunan dengan basis HAM ini. Artinya hak pembangunan dalam negara adalah hak kesetaraan bagi semua individu dalam negara tersebut. Dikarenakan individu merupakan satu komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, diperlukan sebuah aturan yang mengikat dalam melindungi kesetaraan hak-hak individu ini dalam sebuah pembangunan negara.

Dalam perkembangannya di era modern dunia internasional masih terus mengawasi instrumen HAM yang mengikat dunia. Semakin banyak perjanjian-perjanjian internasional untuk mengakomodir hal tersebut. Dunia semakin aktif dalam menggerakkan universalitas HAM. Ketiga fase perkembangan di atas adalah sebuah gambaran awal bahwa dunia peduli dengan kemerdekaan individu secara personal harus dapat diapresiasi lebih untuk menjaga kodrat manusia tersebut.

---

<sup>36</sup> United Nations Documents. *Declaration On The Rights Development 1984*, melalui website <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.html> diakses pada 25 Mei 2013.

Tabel 3.1  
Dari Deklarasi Menuju Penegakan HAM

1.	Deklarasi	Dokumen/resolusi tak mengikat dari badan-badan politik (UN, Sidang Umum Parlemen, dsb.)
2.	Konvensi	Perjanjian internasional yan mengikat, misalnya : - Kovenan PBB tahun 1966/76 - Kenvensi Eropa tahun 1950/53 - Konvensi Amerika tahun 1969/78 - Piagam Afrika (Banjul) 1981/86
3.	Implementasi	Pemantauan perjanjian HAM, misalnya - Prosedur penyampaian keluhan - Prosedur pelaporan - Prosedur inkuiri
4	Penegakan	Langkah-langkah sanksi dan penegakan, misalnya - Pemecatan dari organisasi internasional - Sanksi ekonomi - Intervensi kemanusiaan - Pengadilan pidana internasional - Pengurangan atau penundaan kerjasama pembangunan, bantuan financial,dan sebagainya

Sumber oleh Manfred Nowak<sup>37</sup>

Menggambarkan suatu pembangunan landasan konstitusional oleh dunia internasional atas kesadaran bersama untuk membangun tataran perdamaian dunia yang dicita-citakan bersama. Menjaga kodrat utama manusia dalam tataran dunia, agar nilai hidup seorang individu dapat lebih dihargai. Nilai kemerdekaan masing-masing individu dapat lebih diapresiasi bersama dalam tataran dunia.

Indonesia setidaknya telah menunjukkan banyak upaya atau langkah nyata yang diambil dalam proses HAM tersebut. Indonesia yang aktif dalam organisasi internasional jelas saja tidak boleh ketinggalan dalam menggerakkan upaya penegakan HAM ini. Indonesia sendiri telah banyak meratifikasi instrumen HAM internasional yang berlaku. Dalam UUD 1945 Indonesia bahkan telah dimasukkan dalam pasal 28A-28J sebagai landasan konstitusional mengenai instrumen HAM

---

<sup>37</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute Jilid 14, Jakarta, hal. 26

paling dasar yang berlaku di negeri ini. Telah banyak kemajuan yang dilakukan pemerintah dalam upaya-upaya tentang HAM ini.

Di pihak pemerintah sekarang ini melalui PERPRES RI nomor 23 tahun 2011 tentang RANHAM (Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia) tahun 2011-2014, berupaya menggerakkan seluruh komponen pemerintahan dari pusat hingga ke daerah agar mau bergerak bersama dalam menjunjung nilai kemanusiaan tersebut terutama dalam HAM ini. Bahkan melalui DitJen HAM RI terus berupaya melayani permintaan masyarakat yang masuk ke dalam Kemenkumham yang mengadakan tentang permasalahan HAM. Pelayanan komunikasi masyarakat tentang HAM ini dapat dilakukan melalui pihak pemerintah pusat di Kemenkumham, pihak pemerintah propinsi, maupun sampai pada pihak pemerintah kabupaten/kota melalui kepala daerahnya.

Diluar sektor pemerintahan bahkan banyak LSM dalam negeri yang sangat berperan dalam mengupayakan HAM ini. Komnas HAM, KPAI, LPSK, Ombudsman, dsb merupakan beberapa LSM yang selama ini berperan dalam menjaga nilai HAM itu dapat berlangsung dalam negara ini. Semua upaya yang dilakukan pemerintah atau di luar pemerintahan setidaknya telah memiliki landasan hukumnya melalui konstitusi Indonesia.

## 2. Ruang Lingkup dan Tujuan Kemerdekaan Individu

Melihat lingkup yang terikat dalam kemerdekaan individu merupakan capaian dalam HAM yang terus diproyeksikan dalam universalitas HAM selama ini di dunia internasional. Dalam instrumen universal HAM telah melalui beberapa tahapan seperti :

- Deklarasi Hak Asasi Manusia
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati
- Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Kesepakatan Global

Sejalan dengan perkembangan instrumen universal HAM tersebut juga telah terbangun beberapa perjanjian internasional secara regional yang mengikat secara hukum atas HAM ini, seperti :

- Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia
- Piagam Sosial Eropa
- Pakta San Jose, Kostarika
- Protokol San Salvador
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk
- Dsb.

Kesemua perjanjian yang dibangun baik secara universal maupun regional menjadi upaya bersama masing-masing negara dalam meningkatkan perlindungan individu. Penulis melihat lingkup-lingkup kemerdekaan individu disini telah dilindungi sesuai rumusan Goran Melander dalam bukunya<sup>38</sup> yang menggambarkan beberapa hak-hak yang harus dibangun sesuai dengan beberapa pakta-pakta internasional yang telah dibangun bersama, yaitu :

---

<sup>38</sup> Goran Melander, dkk, *Komplikasi Instrumen Hak Asasi Manusia*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute Jilid 5, Jakarta.

1. Ras (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)
2. Perempuan (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Protokol Opsional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan)
3. Agama (Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan)
4. Anak (Konvensi tentang Hak Anak, Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak dalam Konflik Bersenjata, Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi, dan Pornografi Anak)
5. Minoritas dan Penduduk Asli (Konvensi tentang Penduduk Asli dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, Konvensi Kerangka untuk Perlindungan Minoritas Nasional, Rekomendasi Lund tentang Partisipasi Aktif Minoritas Nasional dalam Kehidupan Publik)
6. Pengungsi (Konvensi mengenai Status Pengungsi, Protokol tentang Status Pengungsi, Konvensi Organisasi Persatuan Afrika yang Mengatur Aspek-Aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika)
7. Pendidikan (Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan)
8. Standar-Standar Buruh (Konvensi mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, Konvensi mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, Konvensi mengenai Kerja Paksa atau Kerja Wajib, Konvensi mengenai



Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Konvensi mengenai Pengupahan bagi Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, Konvensi mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-Prinsip Mendasar dan Hak Kerja)

9. Penyiksaan (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat)

10. Peradilan Pidana (Pedoman Perilaku untuk Aparat Penegak Hukum)

11. Kejahatan Internasional (Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Konvensi mengenai Ketidakberlakuan Pembatasan Aturan Hukum Pada Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan, Statuta Mahkamah Pidana Internasional)

Semua bidang diatas menggambarkan secara keseluruhan lingkup-lingkup yang harus dilindungi secara internasional dalam hal kemerdekaan individu tersebut. Beragam pakta atau perjanjian internasional tersebut sangat mendukung upaya menjaga kodrat manusia secara merata dan bermartabat. Berada dalam status hukum yang sama dan berhak untuk dilindungi hak-haknya yang paling mendasar.

Tujuan yang paling utama dari menjaga kemerdekaan individu ini adalah sejalan dengan keinginan bersama dalam PBB yang berkeinginan menyelamatkan dunia dari peperangan, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya melalui cara yang ditempuh dengan upaya universalitas HAM itu tadi.<sup>39</sup> Memperkuat standar hukum secara internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran atas nilai kemanusiaan terlebih yang terlibat dengan kemerdekaan individu. Agar dapat lebih mengikat masing-masing negara dalam satu aturan hukum yang ketat, demi mengurangi terjadinya pelanggaran tersebut.

Indonesia memahami kemerdekaan individu ini lebih kepada nilai kodrat, harkat dan martabat manusia. Pancasila yang menjadi landasan negara ini memandang kodrat manusia sebagai sifat asli, kemampuan, bakat alami yang ada dalam eksistensi manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>40</sup> Dengan kata lain, Indonesia juga telah menilai kemerdekaan individu ini sebagai tujuan utama yang paling penting dalam nilai kemanusiaan. Melihat sisi penyetaraan derajat pada masing-masing warga negaranya dengan terus berupaya memberikan perlindungan yang cukup untuk rakyatnya tersebut. Menjaga kebebasan rakyatnya dengan UU yang banyak dirumuskan oleh parlemen negeri ini.

## **B. *Human Security***

Mengidentifikasi *human security* tidak akan lepas dari pemahaman makna keamanan. Pondasinya adalah makna keamanan yang mulai mengalami pergeseran. Dinilai secara konvensional keamanan semasa perang terus berfokus pada keamanan nasional. Namun, isu yang muncul pasca perang dingin baik secara konsep maupun fakta telah berubah secara drastis. Hal ini disebabkan semakin rumitnya proses interaksi

---

<sup>39</sup> Tim Pengkajian Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta, *op.cit.*, hal.62-67

<sup>40</sup> *ibid.*

dalam pola hubungan internasional.<sup>41</sup> Raminya dunia internasional oleh beragam aktor hingga menyentuh takaran individu menambah spesifikasi pergeseran makna keamanan ini. Isu keamanan akhirnya memunculkan perhatian yang lebih dekat kepada proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dasar dari setiap manusia. Artinya, proses menjaga keamanan yang harus bisa dijaga dalam skala nasional sekarang dapat melibatkan menjaga keamanan manusia sebagai proyek utama negara.

*Human security* yang dimulai sejak *HDR 1994* yang dikeluarkan oleh *UNDP* saat itu menjadi patokan yang paling utama dari banyak akademisi yang melihat pemahaman akan teori tersebut. Pandangan yang dijelaskan oleh *UNDP* sangat jelas menunjukkan kepada dunia tentang perubahan makna *security* itu sendiri. Membawa pemahaman global tentang perlunya menjaga satu status kemanusiaan, yang perlu dijaga dalam satu kesatuan keamanan yang amat penting. Tanggung jawab dunia seakan menunjukkan pentingnya nilai satu individu dengan adanya pemahaman baru ini, selain adanya proyek universalitas HAM yang telah lama dikejar oleh masyarakat secara global. Akhirnya, *human security* dapat dikaitkan dengan HAM manakala keamanan yang sangat signifikan dituntut oleh setiap individu dapat terlindungi atau terjamin. Maka dianggap perlu memberikan pemahaman spesifik tentang *human security* ini.

#### 1. Arti *Human Security*

Menjelaskan gambaran khusus *human security* ini, tidak banyak ditemukan para akademisi yang melahirkan pemahaman tentang teori ini. Setidaknya menjadi landasan utama yang paling mendasar adalah laporan *UNDP* dalam *HDR 1994*. Secara ringkas konsep *human security* dalam laporan *UNDP* mengandung 2 aspek penting, yaitu :

---

<sup>41</sup> Mustafa Fakhri, *op.cit.*, hal. 110

Pertama, rasa aman dari ancaman-ancaman bahaya kronis seperti kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, represi. Kedua, perlindungan dari gangguan kekacauan tak terduga dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam sebuah komunitas.<sup>42</sup>

Laporan oleh *UNDP* ini menginginkan bahwa setiap individu setidaknya dapat terlindungi kodrat atau martabat hidup yang paling mendasar, bahwa setiap manusia berhak untuk dapat menikmati karunia pemberian Tuhan mengenai pentingnya sebuah nilai kehidupan itu dapat terjaga.

Dalam tesis Mustafa Fakhri ditemukan Kanti Bajpai (*Associate Professor of School for International Studies, Jawaharlal Nehru University*) New Delhi yang mengutarakan:

*with the end of the cold war, the concept of security has increasingly come under scrutiny from scholars and practitioners alike. In the classical formulation, security is about how states use force to manage threats to their territorial integrity, their autonomy, and their domestic political order, primarily from other states. This classical national security formulation has been criticized on various grounds.*<sup>43</sup>

Menggambarkan bahwa, akhir dari perang dingin membawa pemahaman baru yang sangat nyata tentang makna keamanan itu sendiri. Dalam pemahaman klasik keamanan selalu diartikan sebagai suatu negara yang senantiasa menggunakan *power* dalam upaya mempertahankan keamanan yang lebih bersifat teritorial. Terlebih semasa perang berlangsung sangat menyentuh kekuatan militer masing-masing negara sebagai tolak ukur dari kapabilitas suatu negara mempertahankan kedaulatan negaranya. Sebagai yang paling utama akan dilihat nilai keamanan itu selalu sejajar antara *state and power* tentang pemahaman nilai keamanan dimasa itu.

Lebih lanjut, dalam tesis Mohammad Irham ditemukan Woosang Kim dan In-Taek Hyun yang mengungkapkan “*human security* adalah suatu kondisi yang relatif

---

<sup>42</sup> Mohammad Irham, *op.cit.*, hal.17.

<sup>43</sup> Mustafa Fakhri, *op.cit.*, hal. 109.

aman bagi manusia dari gangguan akibat perbuatan manusia itu sendiri mencakup area politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup baik skala nasional, regional, maupun global”.<sup>44</sup> Nilai keamanan yang menunjukkan manusia harus dapat terlindungi hidupnya dari berbagai bidang yang berkembang saat ini. Tidak lagi terfokus pada militer saja, melainkan semua sisi kehidupan manusia yang dapat menjaga kelangsungan hidup manusia dianggap sebagai perlindungan terhadap *human security* ini.

Setidaknya 2 pakar tersebut melihat pergeseran makna dari *security* itu sendiri. Perbandingan mengenai makna keamanan secara klasik digambarkan Kanti Bajpai yang mana keamanan akan selalu berkaitan dengan negara hingga memasuki takaran keamanan manusia yang lebih spesifik telah dijelaskan Woosang Kim dan In-Taek Hyun. Faktor keamanan manusia dapat dilihat dari subjek individu itu itu sendiri. Melihat kondisi interaksi setiap individu yang ada diberbagai bidang yang tidak lagi hanya terfokus pada persoalan militer, namun kian mencakup ekonomi, sosial, politik dan lingkungan tempat tinggal manusia tersebut. Semua faktor tersebut dapat dilihat sebagai suatu ancaman keamanan manusia.

Masalah yang hendak difokuskan dalam keamanan manusia adalah dominasi negara dan aparatnya dalam mendefinisikan, membuat, dan menerapkan keamanan nasional sebuah negara.<sup>45</sup> Pemahaman ini setidaknya memberikan tekanan langsung pada negara untuk melihat kondisi pergeseran dari makna keamanan tersebut. Seringkali negara hanya terfokus pada teritori, militer, atau stabilitas politik dan tidak jarang mengesampingkan kepentingan dan kebutuhan orang-per-orang. Dominasi negara inilah yang membuat keamanan secara personal atas setiap

---

<sup>44</sup> Mohammad Irham, *op.cit.*, hal.19.

<sup>45</sup> Landry Haryo Subianto, *op.cit.*, hal. 104.

individu sering dilupakan, karena masih terfokus dalam takaran menyelamatkan kepentingan nasional. Padahal nilai keamanan manusia kini telah menjadi salah satu fokus utama dunia dalam menyelamatkan kemerdekaan masing-masing individu yang harus tetap dilindungi oleh setiap negara. Negara harus bertanggung jawab penuh atas setiap individu yang hidup dalam wilayahnya. Dalam upaya penegakan nilai HAM untuk menjaga nilai kemanusiaan yang telah dibangun bersama oleh dunia selama ini.

Secara singkat globalisasi menjadi salah satu pemicu kecenderungan similaritas dan uniformitas dari individu.<sup>46</sup> Dengan kata lain perluasan dari globalisasi yang mempermudah pergeseran makna keamanan tersebut di dunia internasional. Pola integrasi yang dibangun oleh globalisasi mempercepat pemahaman bahwa dalam setiap pembangunan yang diambil oleh sebuah negara akan bergantung pada pentingnya seorang individu. Hal ini menonjolkan global yang telah meyakini bahwa aktor baru seperti individu ini menjadi fokus penting masa kini untuk dipahami bersama. Artinya individu berhasil mendapatkan perhatiannya secara nyata dalam hubungan internasional ini. Fokusnya kini berada dalam takaran keamanan manusia yang harus dapat dijaga oleh setiap negara. Dikarenakan makna keamanan itu tadi yang telah bergeser hingga menyentuh keamanan manusia yang juga disebabkan oleh munculnya aktor individu sebagai fokus utama dunia.

Nasir Tamara mengungkapkan *human security* terfokus pada keamanan dan perlindungan terhadap individu, khususnya dalam aspek hak asasi manusia, dengan menghormati HAM merupakan intisari terhadap *human security* itu sendiri.<sup>47</sup> Kita ketahui bersama fokus *human security* sendiri terletak pada setiap gerak individu

---

<sup>46</sup> Anak Agung Banyu Perwita, *op.cit.*, hal.73.

<sup>47</sup> Nasir Tamara, *op.cit.*

yang perlu dilindungi keamanan personalnya. Dengan kata lain, keamanan manusia sejalan dengan proyek HAM tersebut. HAM secara totalitas berjuang dalam menegakkan nilai kemanusiaan secara langsung menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan keamanan manusia tersebut. Setidaknya, dengan menegakkan HAM keamanan manusia dapat terjaga. Dikarenakan keamanan manusia ini bersangkutan dengan segala ancaman terhadap kelangsungan hidup yang nyaman dan aman bagi setiap manusia yang ada.

Keizo Obuchi dalam sebuah artikel berjudul *“Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara”*, digambarkan telah menunjukkan dua bentuk imperatif keamanan manusia, yaitu:

Pertama, beragam ancaman non-negara, seperti: lingkungan hidup, kejahatan transnasional, arus pengungsi dan imigrasi, serta penyebaran penyakit yang merata ke seluruh dunia. Kedua, tekanan yang makin meningkat atas kelompok sosial yang rentan, seperti: fakir miskin, perempuan, anak-anak, dan orang tua yang tidak mampu menghadapi globalisasi dengan kekuatan sendiri.<sup>48</sup>

Beliau, setidaknya menekankan kembali akan bahaya ancaman yang dapat datang di luar kendali negara. Ancaman yang dapat langsung menyentuh setiap individu. Ancaman keamanan manusia yang dinilai setiap gangguan yang dapat merusak kualitas hidup manusia itu sendiri.

Model keamanan manusia menjadi sebuah upaya yang paling ingin mengikat dunia internasional. Bersama paket yang menjunjung universalitas HAM sejalan dengan keamanan manusia ini. Keamanan manusia memusatkan pada kesejahteraan perorangan yang kini harus dipenuhi setiap negara. Keamanan yang tidak lagi terfokus pada keamanan nasional saja. Pergeseran objek keamanan atau yang harus diamankan dari negara ke perorangan, sejalan dengan perluasan aktor hubungan

---

<sup>48</sup> C.P.F. Luhulima, *“Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara”*, *Terorisme dan Keamanan Manusia*, Analisis CSIS, Jakarta, CSIS, 2003, hal. 36.

internasional. Keamanan yang terpusat pada ancaman terhadap terkait dalam satu negara maupun gangguan dari tatanan internasional.<sup>49</sup>

Sebagai akibat dari globalisasi tentunya pengamanan perorangan harus mendapatkan perhatian utama.<sup>50</sup> Integrasi global yang terus mengikat tataran dunia internasional menjadikan keamanan manusia sebagai fokus utama. Keamanan manusia dianggap sebagai bagian dari integrasi proses perdamaian dan keamanan secara global tentunya. Dengan kata lain dunia secara tidak langsung sepakat keamanan manusia dapat menjadi bagian keamanan yang harus dijaga oleh setiap negara, dikarenakan negara adalah bagian dari dunia internasional.

Keamanan manusia ini mengambil manusia sebagai titik referensinya dan tidak hanya memusatkan keamanan pada masalah wilayah ataupun kedaulatan.<sup>51</sup> Menjaga nyawa manusia merupakan pekerjaan pertama bagi negara dalam keamanan manusia ini. Negara harus mampu menjaga stabilitas dalam negerinya sehingga kesejahteraan masyarakatnya dapat terjaga dengan baik. Keamanan manusia adalah tanggung jawab negara yang dibebankan oleh dunia internasional.

Keamanan manusia dari berbagai definisi mengangkat individu sebagai ukuran keamanan utama masa kini. Dikarenakan keselamatan manusia dari berbagai ancaman baik dari lokal, negara maupun internasional perlu dilindungi. Tolak ukurnya kini keamanan manusia lebih difokuskan dibanding keamanan negara. Keamanan manusia menekankan keamanan negara bukanlah tujuan akhir negara. Sebaliknya, bahkan keamanan manusia yang kini dilihat untuk menilai keberhasilan sebuah negara dalam mendukung keamanan dan perdamaian internasional.

---

<sup>49</sup> *ibid.* hal.35

<sup>50</sup> *ibid.*

<sup>51</sup> *ibid.*



## 2. Klasifikasi *Human Security*

Perkembangan *human security* ini setidaknya telah dirumuskan secara detail dalam *HDR 1994*. Diuraikan 7 (tujuh) dimensi yang melekat pada *human security* ini diantaranya: *economic security*, *food security*, *health security*, *enviromental security*, *personal security*, *community security*, *political security*.<sup>52</sup> Ketujuh dimensi ini merupakan rangkaian yang paling mendasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia dan mendapatkan jaminan negara.<sup>53</sup> Inilah yang menjadi klasifikasi khusus dari keamanan manusia tersebut. Keamanan manusia dapat terpenuhi manakala negara terus berjuang dalam menjaga masyarakatnya dalam pemenuhan kebutuhan akan dimensi-dimensi tersebut.

*“Economic security requires an assured basic income-usually from productive and remunerative work, or in the last resort from some publicly financed safety net. But only about a quarter of the world's people may at present be economically secure in this sense”*.<sup>54</sup> Keamanan ekonomi ini merupakan keterjaminan dasar dari pendapatan yang bisa diraih oleh seorang manusia. Dimana manusia ini aman untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan ketersediaan ekonomi yang diperolehnya. Kini hanya sekitar seperempat dari penduduk dunia mungkin saat ini secara ekonomi aman dalam pemahaman ini. Masalah keamanan ekonomi mungkin lebih serius di negara berkembang, meski kekhawatiran juga muncul di negara-negara maju. Masalah pengangguran merupakan faktor penting yang mendasari ketegangan politik dan kekerasan etnis yang terjadi dalam sebuah negara. Disini peran negara dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

---

<sup>52</sup> United Nation Development Programme, *Human Development Report 1994*, New York, Oxford University Press, 1994, hal.25.

<sup>53</sup> Mustafa Fakhri. *op.cit.*, hal.13.

<sup>54</sup> United Nation Development Programme, *Human Development Report 1994. op.cit.*, hal.24-34

*Food security* (keamanan pangan) mensyaratkan bahwa setiap manusia sepanjang waktu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pemenuhan pangan pokoknya. Sejalan dengan yang diungkapkan dalam *HDR 1994*, yaitu :

*Food security means that all people at all times have both hysical and economic access to basic food. This requires not just enough food to go round. It requires that people have ready access to food-that they have an "entitlement" to food, by growing it for themselves, by buying it or by taking advantage of a public food distribution system. The availability of food is thus a necessary condition of security-but not a sufficient one. People can still starve even when enough food is available-as has happened during many famines.*<sup>55</sup>

Keamanan pangan ini merupakan upaya untuk menjaga standar hidup individu dalam sebuah negara. Negara berusaha melahirkan kebijakan ynag bertujuan untuk mempertahankan kebutuhan pangan pokok terus dapat terpenuhi di dalam negerinya. Tentu saja upaya ini dilakukan negara dengan terus bekerja bersama dunia internasional dalam menjaga stabilitas pangan dalam negeri.

*Health security* (keamanan kesehatan) sangat jelas bertujuan menjaga manusia untuk dapat memperoleh perlindungan kesehatan. Diketahui bersama kesehatan adalah salah satu yang paling pokok bagi umat manusia untuk dapat mencapai berbagai aktifitasnya sehari-hari. *HDR 1994* kembali mengungkap “*most of these deaths are linked with poor nutrition and an unsafe environmentparticularly polluted water, which contributes to the nearly one billion cases of diarrhoea a year*”.<sup>56</sup> Sebagian besar yang sangat banyak mengambil nyawa manusia adalah wabah penyakit atau virus yang merebak secara lokal, atau bahkan sampai di dunia internasional. Walau melalui kerjasama penting yang dilakukan dunia tetap saja belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan penyakit atau virus yang mewabah di dunia luas.

---

<sup>55</sup> *ibid.*

<sup>56</sup> *ibid.*

*Enviromental security* (keamanan lingkungan) adalah upaya menjaga lingkungan hidup disekitar manusia. Sumber daya alam yang terdapat di alam adalah salah satu sumber bagi kehidupan manusia. Manusia sangat berhak untuk menjaga kerusakan akan alam dikarenakan akan berdampak bagi manusia itu sendiri nantinya. *HDR 1994* menilai “*human beings rely on a healthy physical environment curiously and the environmental threats countries are facing are a combination of the degradation of local ecosystems and that of the global system. Here the focus is environmental threats within countries.*”.<sup>57</sup> Manusia sangat membutuhkan alam yang sehat dan terjaga. Ancaman dalam lingkungan hidup adalah proyek pembangunan yang digagas oleh manusia itu sendiri yang secara sadar merusak lingkungannya dan mengakibatkan degradasi bagi ekosistem lingkungan.

*Personal security* (keamanan personal) menjadi salah satu yang paling pokok dari keamanan manusia ini. Keamanan personal ini menginginkan manusia dapat terlindungi dari berbagai ancaman yang langsung dapat menyentuh insan manusia semisal tindak kekerasan. *HDR 1994* mengkategorikan ancaman tersebut berupa:

*Threats [rom the state (physical torture), threats from other states (war), threats from other groups of people (ethnic tension), threats from individuals or gangs, against other individuals or gangs (crime, street violence), threats directed against women (rape, domestic violence), threats directed at children based on their vulnerability and dependence (child abuse), threats to self (suicide, drug use).*<sup>58</sup>

Ancaman-ancaman tersebut sangat nyata dapat memberikan dampak langsung yang menyentuh individu secara personal. Keamanan atas ancaman ini setidaknya negara dapat secara tegas memperjuangkan untuk menjaga stabilitas hidup masyarakatnya. Manusia secara personal sangat menginginkan dirinya hidup aman dan nyaman.

---

<sup>57</sup> *ibid.*

<sup>58</sup> *ibid.*

*Community security* (keamanan komunitas) bertujuan untuk melindungi suatu komunitas yang dimiliki satu kelompok individu. Komunitas ini umumnya untuk menjaga hubungan tradisional dan nilai-nilai tertentu yang dipahami bersama semisal kelompok etnis. *HDR 1994* menilai “*most people derive security from their membership in a group-a family, a community, an organization, a racial or ethnic group that can provide a cultural identity and a reassuring set of values. Such groups also offer practical support*”.<sup>59</sup> Kehidupan manusia yang berkelompok biasanya menjamin keamanan secara komunitas namun terkadang juga memunculkan bentrok tersendiri dengan kelompok yang lain. Negara seharusnya dapat mengatur kebijakan yang dapat mengontrol kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk dapat tetap hidup damai dalam berdampingan.

*Political security* (keamanan politik) menekankan dunia untuk mampu melihat keamanan manusia dengan memberikan aspek pentingnya agar manusia yang saling hidup berdampingan dapat saling menghormati HAM. Kediktatoran yang mulai tergelincir dengan datangnya demokrasi menjadi salah satu bukti bahwa dunia ingin melihat HAM dapat ditegakkan secara nyata di panggung internasional. Sejalan dengan yang diungkapkan dalam *HDR 1994* bahwa “*One of the most important aspects of human security is that people should be able to live in a society that honours their basic human rights*”.<sup>60</sup> Negara yang dahulu mengontrol kondisi dalam negerinya dengan banyak mengekang hak kebebasan manusia yang paling mendasar, kini telah banyak berubah berkat digulirkannya demokrasi. Keamanan politik tidak lain untuk menekan represi negara terhadap masyarakatnya. Mengajak seluruh negara bekerja sama dalam mendukung keamanan manusia tentunya.

---

<sup>59</sup> *ibid.*

<sup>60</sup> *ibid.*

Beberapa tantangan global dalam keamanan manusia muncul karena ancaman dalam negara sangat cepat terjadi bahkan hanya dalam skala nasional. Ancaman lingkungan adalah salah satu contoh nyata seperti: degradasi lahan, deforestasi bahkan emisi gas rumah kaca dapat mempengaruhi kondisi iklim di seluruh dunia. *Transnational Crime* menjadi fenomena nyata yang melintasi batas-batas wilayah negara yang dapat mengancam keamanan manusia seperti: peredaran narkoba, penjualan anak, penjual organ vital manusia dan lain sebagainya. Ancaman lain yang terjadi secara global karakter kesenjangan sosial yang terjadi yang kurang mampu diatasi diberbagai negara yang justru menimbulkan permasalahan baru seperti imigran-imigran gelap yang membebankan negara tujuan. Kasus lainnya frustrasi atas ketidakadilan dengan mengambil bentuk fundamentalisme agama atau bahkan terorisme yang mengancam secara global.

Ancaman-ancaman ini telah dikategorikan secara spesifik didalam *HDR 1994*, diantaranya: <sup>61</sup>

- Pertumbuhan penduduk yang tidak diperhitungkan
- Disparitas kesempatan ekonomi
- Imigran internasional yang berlebihan
- Degradasi lingkungan
- Produksi obat terlarang dan penyebarannya
- Terorisme internasional

Ancaman yang sangat perlu untuk segera diantisipasi dalam memperjuangkan keamanan manusia di panggung internasional ini. Keamanan manusia ini adalah wujud upaya untuk menjaga perdamaian dalam keamanan di dunia internasional.

---

<sup>61</sup> *ibid.*

Tabel 3.2  
7 (tujuh) dimensi keamanan manusia (*human security*)

1.	Keamanan Ekonomi ( <i>economic security</i> )	Menyikapi ancaman pengangguran, ketidakamanan dalam bekerja, lingkungan kerja yang buruk, ketimpangan pendapatan, inflasi, jaringan pengamanan sosial yang tidak memadai, ketiadaan rumah.
2.	Keamanan Pangan ( <i>food security</i> )	Menyikapi permasalahan yang terkait dengan akses fisik dan ekonomi dalam memperoleh pangan.
3.	Keamanan Kesehatan ( <i>health security</i> )	Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit-penyakit yang bersifat parasit, dan menginfeksi seperti: HIV dan virus-virus lain; penyakit yang diimbulkan oleh udara dan air yang tercemar; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan.
4.	Keamanan Lingkungan ( <i>environmetal security</i> )	Menyikapi degradasi ekosistem lokal, dan global, kelangkaan air, banjir, dan bencana alam lainnya, pengundulan hutan serta polusi air, udara, dan tanah.
5.	Keamanan Personal ( <i>personal security</i> )	Menyikapi ancaman terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh negara dan organisasi kriminal tertentu. Juga mencakup dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat sekitar serta kecelakaan lalu lintas.
6.	Keamanan Komunitas ( <i>community security</i> )	Menyikapi ancaman benturan-benturan antara kelompok tertentu, misalnya kekerasan antara etnis yang berbeda.
7.	Keamanan Politik ( <i>political security</i> )	Menyikapi ancaman terhadap pelanggaran HAM maupun represi yang dilakukan oleh negara.

Sumber oleh Muhammad Irham<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Mohammad Irham, *op.cit.*, hal.17-18

**BAB IV**

**SUBSTANSI KEMERDEKAAN INDIVIDU DALAM KERANGKA**

***HUMAN SECURITY DI INDONESIA***

*UNDP* melalui *HDR 1994* telah menguraikan keamanan manusia dalam 7 (tujuh) dimensi keamanan yang harus dijaga dalam mewujudkannya. Keamanan pangan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik menjadi fokus utama dalam keamanan manusia tersebut. Mewujudkan 7 (tujuh) dimensi keamanan tersebut adalah cara dalam menjaga keamanan manusia tentunya. Dunia melihat keamanan manusia sebagai upaya dalam menjaga keamanan secara internasional menginginkan seluruh negara dapat bekerja sama dalam mewujudkannya.

Dalam artikel milik Landry ditemukan, George Maclean yang menegaskan pada inti tugas pengelolaan keamanan negara memiliki dua tujuan esensial, yakni: “memelihara keutuhan wilayah negara dan integritas nasional, serta memastikan tersedianya barang-barang kebutuhan publik yang terdistribusi baik ke seluruh warga negara”.<sup>63</sup> Pemenuhan kebutuhan publik ini tidak lain upaya dalam melindungi kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain menjaga kualitas hidup masing-masing individu dalam negaranya. Hal ini mengajak seluruh negara dalam menjaga keamanan dalam negeri harus senantiasa dapat turut mendukung dalam perwujudan keamanan manusia.

Indonesia yang berjuang menegakkan HAM dalam negerinya sudah tentu sangat memperhatikan sisi keamanan manusia ini. Sejak masuknya demokrasi di Indonesia telah membawa banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan dalam negeri.

---

<sup>63</sup> Landry Haryo Subianto, *op.cit.*, hal.115

Demokrasi di Indonesia seakan membuka kerang kebebasan bagi banyak publik untuk dapat berkreasi dan berekspresi secara luas. Indonesia terbilang siap dalam mengikuti segala perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Serius dalam melaksanakan demokrasi menjadi salah satu langkah kongkrit yang diyakini.

Indonesia kini lebih serius dalam mendukung HAM. Semakin banyak instrumen HAM internasional yang dianut pada perundang-undangan dalam negeri ini. Hal ini dilakukan tentu saja untuk dapat melindungi secara nyata hak-hak paling mendasar yang dimiliki setiap masyarakatnya. Namun, yang terjadi di Indonesia dengan pola demokrasi dan upaya penegakkan HAM tidak serta-merta dapat berjalan dengan lancar dan tetap saja tidak dapat dikatakan gagal. Hal ini dikarenakan keragaman etnis yang terdapat dalam negeri Indonesia memberikan terlalu banyak variasi pilihan dalam mengambil sebuah kebijakan yang tepat sasaran. Tentu saja pemerintah Indonesia juga terus berupaya dalam mengatasi segala hambatan tersebut.

Diketahui gelombang demokratisasi yang terjadi di dunia internasional dalam pengaplikasiannya di negara-negara berkembang tidak selalu berjalan lancar, namun seringkali mendapat permasalahan masing-masing. Indonesia setidaknya menjadi salah satu negara berkembang yang beruntung mengaplikasikan sistem demokrasi tersebut. Indonesia dan sistem demokrasi yang berjalan saat ini nyatanya masih memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan keamanan manusia yang sedang difokuskan dunia masa sekarang. Tolak ukur menjaga keamanan manusia oleh pemerintah Indonesia akan dilihat penulis dalam substansi dasar kemerdekaan individu itu sendiri dalam negeri ini. Hakekat kemerdekaan individu ini akan dilihat dalam keterjaminan hak hidup dan hak berusaha serta kesejahteraan yang dimiliki masyarakat Indonesia.



## A. Keterjaminan Hak Hidup

Menilai kemerdekaan individu ini akan difokuskan pada “*right to life*” sebagai tolak ukur yang paling utama dalam permasalahan bangsa ini. Spesifiknya, penulis menitikberatkan *personal security* sebagai hak atas rasa aman yang berhak dituntut oleh setiap individu dalam negeri ini kepada pihak pemerintahnya. Negara memiliki kewajiban positif untuk memberikan standar minimum atas hak hidup, integritas, dan keamanan pribadi setiap individu.<sup>64</sup> Sebagai bukti bahwa negara benar-benar mau bertanggung jawab untuk menjaga segala ancaman atas seorang individu berupa pembunuhan, serangan kekerasan fisik, pelecehan, intimidasi, maupun diskriminasi. Kesemuanya bersentuhan langsung pada harkat dan martabat seorang manusia.

Hak atas rasa aman dapat dikatakan terlindung dari tindak kekerasan baik yang datang dari *state* atau *non-state* (misalnya, konflik komunal).<sup>65</sup> Rasa aman tentunya akan memberikan efek positif manusia terhindar dari rasa takut. Rasa aman ini tentunya membawa individu hidup lebih nyaman dan mengembangkan produktifitas yang lebih baik lagi dalam menjangkau hak hidupnya kedepan. Negara harus sigap melihat kondisi sosial dalam masyarakatnya untuk dapat mengontrol keamanan personal ini. Setidaknya negara harus mampu melahirkan kebijakan yang ditujukan untuk menghapuskan, atau mengurangi tingkat kekerasan yang harus dibedakan dengan jelas antara perlakuan *state* atau *non-state*.

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan "bahwa kebebasan itu ialah hak segala bangsa ..." dan "... rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya". Hal ini menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan manifestasi politik penentuan nasib sendiri yang sepenuhnya dicapai melalui perjuangan rakyat Indonesia.

---

<sup>64</sup> Muhammad Syafari Firdaus, dkk. *op.cit.*, hal.71-74

<sup>65</sup> Nasir Tamara. *op.cit.*

Setelah berakhirnya era penjajahan pada tahun 1945, Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Hak untuk menentukan nasib sendiri dilaksanakan oleh Indonesia telah dilalui dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, setelah periode panjang pendudukan asing. Pernyataan tersebut adalah konsensus nyata dari seluruh rakyat Indonesia, terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Ini adalah fakta bahwa semua kelompok etnis berkomitmen penuh untuk bersatu dan mengembangkan satu negara dan satu bangsa, Indonesia. Kesadaran ini diwujudkan dalam perjuangan kemerdekaan yang mencapai puncaknya di akhir PD II. Proklamator kemerdekaan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang segera diikuti oleh pengakuan negara lain, terutama negara-negara Asia dan Afrika.

Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, secara langsung mengajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengenal kemerdekaan individunya masing-masing. Pancasila sila ke-2 menyebutkan, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengikat seluruh individu bangsa ini akan suatu dasar harkat dan martabat yang berhak dimilikinya masing-masing. Manusia Indonesia senantiasa berhak untuk hidup adil dan beradab di dalam negerinya. Pemerintah diminta secara tegas untuk menjamin hak dasar manusia ini sesuai dengan dasar negara ini.

Namun, mengingat kembali yang terjadi di masa orde baru tentang sebuah kepemimpinan yang otoriter berjalan dalam bangsa ini, banyak terjadi penangkapan bahkan pembunuhan yang semena-mena. Walau diketahui bersama bahwa nyawa seorang individu itu dinilai sangat berharga dan bermartabat, tetap saja banyak terjadi kasus tersebut. Dikarenakan kepentingan pemimpin saat itu yang sangat kurang dalam

memperhatikan masyarakatnya. Penangkapan bahkan penghilangan nyawa manusia kala itu, belakangan diketahui telah dilakukan oleh aparat TNI, yang seharusnya memberi rasa aman kepada masyarakat sekitarnya, sebaliknya menjadi pelaku utama dalam tingkat pelanggaran HAM berat yang terjadi. Diketahui pada masa itu suasana yang dibentuk pihak pemerintahan dan aparatnya sangat tidak memberikan efek nyaman atau aman untuk dapat hidup tenang dalam negeri ini.

Memasuki masa demokratisasi sistem pemerintahan Indonesia, ternyata tetap saja masih kurang memberi dampak yang signifikan tentang hak atas rasa aman bagi individu ini. Demokrasi yang secara nyata menjadi sasaran utama dalam penegakan HAM dalam negeri ini belum mampu menutup banyak perlakuan tentang pengambilan nyawa manusia secara semena-mena. Diawal demokrasi ini digulirkan di Indonesia telah terjadi banyak pertumpahan darah oleh mahasiswa yang kala itu berjuang dalam reformasi melawan pihak aparat pemerintahan. Penembakan pihak kepolisian kepada mahasiswa yang berdemonstrasi, seakan menutup mata aparat itu dalam melihat berharganya setiap nyawa yang dimiliki mahasiswa-mahasiswa tersebut. Rakyat Indonesia masih berjalan dalam mencari hak untuk mendapatkan rasa aman dalam negeri ini.

Bahkan saat negeri ini mulai mengaplikasikan demokrasi ini, masih saja sepenuhnya negeri ini belum dapat dikatakan aman secara keseluruhan. Mengingat kembali kematian seorang pejuang HAM Indonesia yang dikabarkan meninggal dalam penerbangannya menuju Amsterdam tahun 2004 silam. Sebelum meninggal beliau memperjuangkan aktivis yang menjadi korban penculikan Tim Mawar dan Kopassus. Hanya sekedar informasi tentang beliau yang telah diracuni dalam penerbangannya tersebut menuju Amsterdam, dan tidak ada kesimpulan pasti tentang kronologi

kematian dan pembunuh Munir ini. Dikarenakan dugaan yang berhembus tentang banyaknya pihak yang sangat ingin menyingkirkan aktor pejuang HAM Indonesia ini.

Disamping itu, konflik komunal dari segi keagamaanpun masih terjadi di awal tahun 2000an. Mengingat kasus yang terjadi di Ambon dan Poso, menjadi konflik agama terparah yang dimiliki Indonesia. Sangat banyak pertumpahan darah yang terjadi antara 2 kelompok yang bertikai kala itu. Ribuan nyawa manusia melayang dalam konflik tersebut. Bahkan nilai agamapun seperti tidak melirik harkat dan martabat manusia adalah satu yang paling mendasar dari segi kehidupan. Rakyat Indonesia masih mencari titik aman dalam kehidupannya yang hidup dalam keberagaman suku tersebut.

Pemerintahan Indonesia dituntut untuk lebih peka dalam menjaga hak atas rasa aman bagi rakyatnya. Rakyat Indonesia berhak hidup aman dan nyaman dalam negerinya. Namun, tidak berhenti sebatas rakyat Indonesia yang hidup dalam negeri ini saja. Dikarenakan banyaknya jumlah penduduk yang tercatat sebagai warga negara Indonesia yang hidup di negara luar negeri baik sebagai pelajar bahkan tenaga kerja Indonesia (TKI). Diketahui banyak permasalahan TKI di luar negeri yang senantiasa tidak terpenuhi kodrat utamanya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Bererapa kasus bermunculan memasuki tahun 2000 tentang TKI di Malaysia yang tidak mendapat bayaran gaji bahkan hanya mendapat penganiyaan dari majikannya.

Perlindungan TKI oleh pemerintah Indonesia tentunya menjadi salah satu pokok utama juga dalam keterjaminan hak hidup ini. TKI yang tercatat sebagai WNI tentu saja masih menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Setidaknya melalui departemen luar negeri Indonesia yang menjalin hubungan luar harus sebagai optimalisasi peran pemerintah Indonesia di luar negeri terhadap pemantauan bentuk-bentuk pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh majikan TKI tersebut, bahkan mampu untuk mengambil tindakan cepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Perkembangannya kini, pemerintah Indonesia telah turut banyak andil dalam meratifikasi instrumen HAM internasional yang diadopsi kedalam perundang-undangan dalam negeri. Indonesia memiliki UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan politik yangmana pasal 7, pasal 9, pasal 10 ayat 1, dan pasal 17 menjelaskan tentang kebebasan pribadi yang beradab dan merdeka tanpa campur tangan pihak lain.<sup>66</sup> Pemerintah bersedia menjamin setiap individu harus memiliki jiwa merdekanya masing-masing. Ini sebagai salah satu pembuktian dalam kemajuan pemerintahan Indonesia untuk turut lebih waspada dalam memberikan perlindungan nyata atas *personal security* ini bagi masing-masing individu. Walau masih saja hingga detik ini sangat sering kita mendengar kasus-kasus pembunuhan yang terjadi dimasyarakat. Artinya masih saja ada individu yang sangat tidak menghargai nyawa manusia lainnya. Menjadi tugas bagi pemerintah dalam mensosialisasikan betapa berharganya nyawa manusia di mata dunia.

*Personal Security* sebagai ikatan dalam menjaga hak atas rasa aman ini menjadi salah satu target capaian utama *human security* dari segi keterjaminan hak hidup yang dimiliki secara personal oleh setiap individu di negeri ini. Indonesia melalui kebijakannya harus mampu menjaga harkat dan martabat sebagai hak paling mendasar bagi setiap insan manusia.

## **B. Keterjaminan Berusaha dan Berkesejahteraan**

Kemerdekaan individu dalam hal keterjaminan berusaha dan kesejahteraan dalam perspektif *human security* ini, penulis lebih fokuskan dalam *economic security*

---

<sup>66</sup> Muhammad Syafari Firdaus, dkk. *op.cit.*, hal. 71-74

dan *food security*. Dalam hal ini akan dilihat aktifitas yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong rakyatnya bergerak dalam perekonomian, serta dalam menyokong kesejahteraan hidup rakyatnya dalam hal pemenuhan kebutuhan mendasar yaitu pangan. Hak atas pekerjaan sebagai dasar perlindungan *economic security*, dan hak atas kecukupan pangan dalam perlindungan *food security*.

Keamanan ekonomi lebih mendorong akses kebebasan yang disediakan negara atas memperoleh pekerjaan. Hak atas pekerjaan yang dijamin oleh Indonesia kepada masyarakatnya akan menjadi satu analisis penulis. Hak atas pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak merupakan hak yang tidak bisa di tawar-tawar lagi.<sup>67</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan yang diperoleh oleh suatu individu dapat turut serta mendorong dalam kesejahteraannya. Maka dalam hal kajian keterjaminan berusaha ini tidak akan terlepas dengan tingkat kualitas pekerjaan yang akan diperoleh rakyat Indonesia tentunya atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan ini. Pekerjaan ini tentunya harus layak sesuai standar dalam hukum HAM internasional tentang keamanan pekerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja.<sup>68</sup>

Indonesia dalam *Millenium Development Goal's Programme* 2015 menginginkan pekerjaan yang layak dan produktif yang harus mampu diwadahi oleh negara. Salah satu tujuannya untuk mengurangi separuh proporsi orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu US dollar perharinya ditahun 2015.<sup>69</sup> Pekerjaan menjadi satu tolak ukur utama dalam kesejahteraan individu tersebut. Hak atas pekerjaan ini harus mampu diwadahi oleh Indonesia sebagai negara yang turut andil dalam *MDGs* ini. Pentingnya hak atas pekerjaan ini menginginkan standar pekerjaan yang layak untuk seorang individu, karena tanpa pekerjaan tersebut akan membuat masyarakat jatuh

---

<sup>67</sup> *ibid.* hal.46-51.

<sup>68</sup> *ibid.*

<sup>69</sup> *ibid.*

dijurang kemiskinan. Sedangkan kemiskinan ini adalah masalah yang harus bisa diatasi dalam pembangunan bangsa ini.<sup>70</sup>

Dalam landasan kostitusional negeri ini, pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, “bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mencari nafkah manusiawi”. Hak ini lebih jauh ditegakkan oleh Pasal 28D ayat 2 yang menyatakan, “bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan tepat dan perlakuan dalam pekerjaan”. Sangat jelas negara ini menginginkan seluruh rakyat Indonesia memiliki pekerjaan yang layak dalam kehidupannya. Semuanya diberikan pegangan yang kuat atas hak untuk mencari nafkah dan bekerja.

Indonesia juga menekankan dalam UU No.21 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO mengenai larangan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Selain itu, Konvensi Intrnasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang tercantum dalam pasal 8 mengenai larangan perbudakan, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 9 yang menjelaskan tentang kewajiban negara dalam keselamatan kerja, kondisi kerja, dan jaminan sosial. Menjadi landasan umum pemerintahan dalam menjaga hak atas pekerjaan bagi rakyatnya. Ini sejalan dengan hak atas pekerjaan yang menginginkan kondisi pekerjaan yang adil dan mendukung termasuk upah yang layak serta waktu bekerja dan istirahat yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.<sup>71</sup>

Hak atas pekerjaan ini juga menekankan semua kesempatan kerja maupun kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan haruslah layak secara budaya dan konsisten dengan martabat individu tersebut.<sup>72</sup> Pemerintah selain dituntut mampu membuka lapangan pekerjaan, juga harus yang mampu menjaga harkat dan martabat

---

<sup>70</sup> *ibid.*

<sup>71</sup> *ibid.*

<sup>72</sup> *ibid.*

rakyatnya dalam pekerjaannya. Aksesibilitas pekerjaan yang terbuka secara luas dalam masyarakat setidaknya harus mampu dijangkau oleh rakyatnya tersebut sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Dengan kata lain diperlukan juga strategi lain pemerintah untuk mendorong rakyatnya juga agar mau untuk bekerja secara layak juga tentunya.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah menetapkan arahan untuk sektor pasar tenaga kerja dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional 2005-2025, yaitu:<sup>73</sup> (a)menciptakan jumlah tertinggi kerja formal, (b)meningkatkan kesejahteraan pekerja informal, (c)menciptakan hubungan yang harmonis industri dengan perlindungan yang layak, (d)keamanan pekerja yang tepat, (e)finalisasi proses industri yang memuaskan semua pihak, (f)produktivitas yang tinggi agar mampu bersaing dalam mendapatkan nilai tambah yang tinggi, (g)manajemen pelatihan dan dukungan program pelatihan strategis, dan (h)pembekalan kompetensi pengakuan pekerja sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global.

Dalam rangka mencapai arahan kebijakan pasar tenaga kerja, pemerintah Indonesia telah meningkatkan tenaga kerja dan iklim investasi, kualitas tenaga kerja ditingkatkan, kesempatan kerja meningkat, memfinalisasi peraturan tenaga kerja, peningkatan migrasi tenaga kerja, dan mengambil langkah-langkah lain yang mendukung pasar tenaga kerja.<sup>74</sup> Perkembangannya, dalam periode tahun 2004-2009 pasar tenaga kerja Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.<sup>75</sup> Termasuk menurunnya jumlah pengangguran terbuka, meningkatnya tingkat pendidikan pekerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan jumlah pekerja formal dibandingkan dengan pekerja informal, dan penyuluhan jam kerja. Pemerintah cukup memberikan

---

<sup>73</sup>Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Report Of The Government Of The Republic Of Indonesia On The Implementation Of International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights*

<sup>74</sup> *ibid.*

<sup>75</sup> *ibid.*



peran besar dalam menunjang hak atas pekerjaan ini. Selanjutnya menjadi sasaran utama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 adalah menurunkan persentase pengangguran terbuka menjadi 5-6 persen dari jumlah penduduk Indonesia diakhir 2014.<sup>76</sup>

Strategi untuk merealisasikan hak atas pekerjaan ini juga sebaiknya terus diarahkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pekerjaan bagi masyarakat guna menyokong terus pembangunan bangsa. Peningkatan pendapatan dan berkurangnya pengangguran adalah jawaban dari cara tersebut. Beberapa langkah berkesinambungan yang diambil haruslah berprinsip, berikut :<sup>77</sup>

- Mengambil tindakan untuk meningkatkan potensi produksi dibidang ekonomi secara berkelanjutan,
- Melahirkan kebijakan yang harus memberikan kepastian bahwa peningkatan produksi harus sejalan dengan pemaksimalan permintaan tenaga kerja,
- Membuat suasana atau kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk mau turut bergabung dalam proses ekonomi yang berjalan.

Tentunya dengan tetap berpegang pada HAM, karena setiap langkah yang menghalangi masyarakat untuk terjun dalam proses ekonomi erat dengan pelanggaran HAM.

Sesuai dengan standar instrumen HAM internasional, negara harus melarang dan menghapuskan jenis-jenis pekerjaan yang sebenarnya melanggar HAM itu sendiri.<sup>78</sup> Misalnya, perbudakan, prostitusi paksa, pekerja anak, dan pekerjaan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Bahkan pekerjaan yang bisa saja memuncuakn

---

<sup>76</sup> *ibid.*

<sup>77</sup> Muhammad Syafari Firdaus, dkk. *op.cit.*, hal. 49-51.

<sup>78</sup> *ibid.*

diskriminasi tentunya menjadi permasalahan juga yang harus diatasi. Berbagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan meliputi disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 yang menjamin “bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi”, dan Pasal 6, yang menyediakan “setiap pekerja berhak perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari sesama pengusaha atau pekerja”.

Selain itu, seorang pekerja juga harus diberikan kekuatan hukum untuk mengorganisasikan dirinya dalam bekerja.<sup>79</sup> Ini ditujukan agar para pekerja dapat langsung terlindungi secara hukum atas hak-hak pekerjaannya. Disamping itu, sebuah jaminan sosial pekerja juga dibutuhkan dalam menjaga hak dasar hidupnya dalam pekerjaannya tersebut.

Standar keterjaminan berusaha yang dimiliki rakyat Indonesia dalam hal pemenuhan hak atas pekerjaan sebagai kewajiban pemerintah Indonesia, nyatanya tidak berhenti dalam hal tersebut untuk menilik kesejahteraan dalam nilai kehidupan masyarakat ini. *Economic security* setidaknya memberikan perlindungan bagi individu dalam negara untuk menuntut haknya mendapatkan kualitas pekerjaan layak menuju kesejahteraan. Namun, mengukur kesejahteraan yang paling dasar disini dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sebagai penopang hidup manusia. Pangan sesuatu kebutuhan dasar yang harus tercukupi dalam memperoleh kesejahteraan.

Keterjaminan kesejahteraan ini tentunya mengukur pemenuhan pangan sebagai salah satu yang paling utama dalam bahasan penulis. Hak atas kecukupan pangan menegaskan setiap individu sangat berhak untuk dapat memenuhi pangannya sehari-hari, bahkan kondisi suatu masyarakat dalam negara sekalipun. Disinilah akan

---

<sup>79</sup> *ibid.*

diarahkan sebuah peran utama negara terhadap *food security* dalam negerinya yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakatnya.

*Food security* sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kecukupan pangan bagi seluruh rakyatnya. Hak atas kecukupan pangan memainkan peran penting dalam kaitannya dengan pembangunan, terutama untuk mengurangi kemiskinan yang selalu diantui oleh kekurangan gizi dan kelaparan.<sup>80</sup> Manusia yang lapar tentunya tidak dapat beraktifitas dengan baik. Makanan menjadi sumber energi bagi manusia untuk dapat menjalani kehidupannya. Asupan gizi menjadi nilai pokok dalam pertumbuhan setiap manusia. Kekurangan gizi dapat berdampak pada munculnya penyakit atau tidak berkembangnya kecerdasan otak manusia. Kecukupan pangan tentunya sangat dibutuhkan untuk keselamatan hidup manusia.<sup>81</sup>

Hak atas pangan mengandung arti :<sup>82</sup>

(a)ketersediaan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dari semua individu dalam bentuk yang bisa diterima secara kultural, (b)aksesibilitas pangan dengan cara-cara yang berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan hak asasi manusia lainnya.

Ketersediaan pangan mengacu pada tersedianya sumber daya alam dan lahan produktif atau bahkan sistem pendistribusian bahan pangan untuk pemenuhan konsumtif bagi setiap individu. Aksesibilitas pangan mengarah pada kemampuan setiap individu baik secara akses fisik maupun ekonomis dapat menjangkau segala kebutuhan pangan untuk pribadinya. Akses fisik mengharapakan pangan dapat dijangkau oleh setiap kelompok masyarakat termasuk pada individu yang mengalami keterbatasan fisik. Akses ekonomi

---

<sup>80</sup> *ibid.* hal.51-55.

<sup>81</sup> *ibid.*

<sup>82</sup> *ibid.*

mengharapkan pangan dapat terpenuhi oleh setiap strata sosial dalam masyarakat. Hak atas pangan akhirnya mencakup pada keamanan pangan dan jaminan pangan.<sup>83</sup>

Keamanan pangan disini mencakup bahwa pangan harus terbebas dari unsur-unsur yang membahayakan dan jaminan pangan menekankan pada hilangnya ancaman untuk terjadinya kelaparan.<sup>84</sup> Negara dituntut untuk mampu memberikan kesetaraan atas hak semua warga negaranya agar dapat mengakses secara bebas pangan sebagai kebutuhan pokok ini. Indonesia sesuai UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pasal 11, menjelaskan tentang, “negara yang mengakui hak atas setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri, termasuk kelayakan pangan, hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, serta metode dalam konservasi dan distribusi pangan”.<sup>85</sup> Artinya Indonesiapun dituntut untuk paham dalam mengontrol kebutuhan pangan dalam negerinya.

Kondisi pangan dunia yang terus-menerus tidak stabil seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia yang melampaui prediksi awal, dikhawatirkan dapat menjadi topik utama dunia dalam hal krisis pangan. Menurut laporan *Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) Food and Agricultural Organization (FAO)*, melaporkan produksi pertanian global untuk komoditas yang tercakup dalam outlook (2013-2022) diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 1,5% rata-rata per tahun, dibandingkan dengan 2,1% pada dekade sebelumnya (2003-2012). Hal

---

<sup>83</sup> *ibid.*

<sup>84</sup> *ibid.*

<sup>85</sup> *ibid.*

ini menjadi pertumbuhan yang lebih lambat diharapkan, yangmana akan dipamerkan oleh semua sektor produksi pertanian dan ternak.<sup>86</sup>

Kecenderungan ini mencerminkan meningkatnya biaya, keterbatasan sumber daya alam, dan tekanan lingkungan meningkat, yang diantisipasi untuk menghambat respon pasokan di hampir semua daerah. Lebih jelas lagi OECD-FAO ini memberitakan perluasan produksi pertanian cenderung lambat setidaknya dalam jangka menengah dengan perluasan areal terbatas dan pertumbuhan produktivitas lambat, tetapi pasokan harus mengimbangi permintaan sehingga harga yang diperkirakan masih relatif tinggi.<sup>87</sup> Dalam konteks ini, langkah-langkah untuk mengurangi kehilangan makanan akan menjadi penting dalam memenuhi meningkatnya permintaan dan untuk meningkatkan produktivitas.

Dunia mulai merasakan dampak buruk tersebut dan kini menjadi satu permasalahan utama yang sangat membebani negara. Kompas.com 15 Juni 2013 merilis berita yang berisikan,

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan, pertumbuhan jumlah penduduk dunia ternyata lebih tinggi daripada perkiraan dua tahun lalu. Revisi prediksi pertumbuhan tersebut memunculkan pertanyaan soal daya dukung alam dan sejumlah masalah lain, Menurut laporan terbaru ini, pertumbuhan penduduk paling tinggi akan terjadi di negara-negara berkembang.<sup>88</sup>

Pertumbuhan penduduk dunia yang sangat cepat dengan tidak dibandingi hasil pangan yang melimpah, menghasilkan krisis pangan. Diketahui juga permasalahan produksi pangan dunia dari beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan negara eropa

---

<sup>86</sup> OECD, 2013. “*OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022*”, melalui website <http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2013.

<sup>87</sup> *ibid.*

<sup>88</sup> Bambang Priyo Jatmiko, 2013. *Pertumbuhan Penduduk Dunia Lampau Prediksi*, melalui website <http://internasional.kompas.com/read/2013/06/15/10091516/Pertumbuhan.Penduduk.Dunia.Lampau.Prediksi> diakses pada tanggal 02 Oktober 2013.

lainnya yang terkendala dalam cuaca yang buruk, turut mempersulit keadaan dalam menghasilkan permintaan produksi pangan yang terus meningkat.

Bahkan Indonesiapun turut merasakan dampak buruk ini. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) 17 Juli 2013, mengungkapkan “pada 2013 ini diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun”.<sup>89</sup> Secara otomatis akan melahirkan permintaan yang terus meningkat atas kebutuhan pangan ini tentunya. Namun, mengingat dunia yang secara umum juga mengalami masalah dalam produksi pangan dan Indonesia yang masih tergantung dalam impor pangan, tentu saja sangat mempengaruhi jumlah pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Akhirnya harga pangan melambung karena kekurangan distribusi pangan ke pasar lokal.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sejak dekade lalu telah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama untuk mengurangi kesenjangan antara daerah. Komitmen ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar makanan di rumah tangga dapat dijangkau. Upaya yang dilakukan melalui program-program untuk meningkatkan produktivitas pertanian, distribusi, akses dan sistem penanganan masalah pangan, serta bantuan khusus untuk penduduk miskin bagi provinsi dan kabupaten dengan prevalensi kekurangan gizi. Pemenuhan gizi penduduk sebagai salah satu bentuk mensejahterahkan masyarakat

---

<sup>89</sup> Yogi Ardhi Cahyadi, 2013. *2013 Penduduk Indonesia Diperkirakan 250 Juta Jiwa*, melalui website <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa> diakses pada tanggal 02 Oktober 2013.

dengan menyokong aksesibilitas yang dapat dijangkau atas pangan sebagai kebutuhan pokok manusia.

Berdasarkan Instruksi *Food and Nutrition Action Plan 2011 - 2016* yang dikembangkan berisi program orientasi aksi yang terstruktur dan terintegrasi dalam lima pilar rencana aksi. Pilar-pilar ini merupakan upaya, untuk meningkatkan tingkat gizi masyarakat; peningkatan aksesibilitas pangan, meningkatkan kontrol kualitas dan keamanan pangan; meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan memperkuat lembaga makanan dan gizi.<sup>90</sup> Rencana aksi ini dikembangkan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pangan dan pembangunan gizi, ditingkat pusat provinsi dan kota/kabupaten, baik untuk pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Upaya untuk memastikan akses terhadap pangan bagi individu dan kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, termasuk buruh tani dan kelompok minoritas dilakukan melalui penyediaan lahan pemukiman kembali, pemanfaatan tanah di dekat hutan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat tentang kehutanan, kredit mikro, koperasi dan UKM, percepatan makanan berbasis sumber daya diversifikasi konsumsi lokal melalui perbaikan teknologi budidaya, teknologi pengolahan makanan, subsidi beras bagi masyarakat miskin, dan program bantuan langsung tunai.<sup>91</sup> Komponen pusat maupun daerah telah dibentuk untuk melaksanakan upaya-upaya ini. Berbagai badan yang didukung dari Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bertanggung jawab untuk ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah tersebut.

---

<sup>90</sup> Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Report Of The Government Of The Republic Of Indonesia On The Implementation Of International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights*

<sup>91</sup> *ibid.*

Program Bantuan Pangan merupakan kelanjutan dari Operasi Pasar Khusus (Operasi Pasar KHUSUS/OPK) program yang dilakukan pada tahun 1998.<sup>92</sup> OPK mempertimbangan untuk memberikan beras sebagai implementasi dari Program Bantuan Pangan adalah kenyataan bahwa beras adalah makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, proporsi terbesar dari beban rumah tangga miskin adalah pengeluaran makanan. Menunjukkan bahwa kebutuhan pokok seperti beras ini menjadi tanggung jawab penting sebuah pemerintahan Indonesia dalam menjaga ketersediaannya. Data BULOG menyatakan bahwa pada tahun 2007, Pemerintah mengadakan Program Raskin untuk 15,8 juta Rumah Tangga Miskin, ditahun 2009 jumlahnya meningkat menjadi 19,1 juta rumah tangga dan terus diperkirakan bahwa 1,6-3.200.000 ton dibagikan dalam 2005-2009 dalam pelaksanaan program hingga pada tahun 2011 pemerintah menargetkan 17,5 juta rumah tangga dengan 3,15 juta ton beras yang dialokasikan.<sup>93</sup>

Tahun 2005 pemerintah juga telah mengembangkan Cadangan Beras Pemerintah (entitas pengendali Beras Pemerintah/CBP), bertujuan untuk memenuhi pangan dalam keadaan darurat seperti bencana, dan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam rangka akan tersedianya bagi semua lapisan masyarakat.<sup>94</sup> Bahkan pemerintah juga telah bergabung dan berkontribusi dalam Cadangan Beras darurat ASEAN dalam upayanya untuk menjamin pasokan pangan nasional dalam kasus krisis. Krisis pangan yang pernah terjadi di tahun 2008 setidaknya mampu dilalui Indonesia dengan beragam aksi yang diterapkan dalam dekade tersebut. Dalam konferensi dunia tentang pangan dunia Indonesia pernah terlibat dalam deklarasi Roma tentang keamanan pangan dunia 1996, rencana aksi pertemuan tingkat tinggi dunia 2002.

---

<sup>92</sup> *ibid.*

<sup>93</sup> *ibid.*

<sup>94</sup> *ibid.*



Indonesia kini disinyalir kembali akan menghadapi krisis pangan sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, tentunya semakin mempersulit kembali dalam upaya menjaga pemenuhan pangan nasional. Ikut dalam *MDGs Programme* tentang penghapusan kelaparan sebagai salah tugas berat yang kembali diemban pemerintah dalam kasus ini. Pangan dan kelaparan harus mampu diselesaikan dalam solusi cermat untuk pemenuhan hak atas kecukupan pangan ini.

Potensi terjadinya krisis pangan di Indonesia ini juga didorong terjadinya kekeringan, aksi spekulasi di pasar, minimnya anggaran produksi pangan, dan kecilnya pendapatan petani. Sehingga, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengatasi ancaman krisis pangan dibutuhkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kebijakan pertanian. Pemerintah harus meningkatkan anggaran produksi pangan, membuka akses daerah yang terisolasi, dan meningkatkan pendapatan petani. Dimana, perekonomian suatu negara selalu ditujukan kearah pencapaian kemakmuran rakyat. Apabila kekeringan ini berlanjut dikhawatirkan akan muncul krisis pangan, meskipun pemerintah membuka kerang impor pangan.

UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 2 menyebutkan 8 poin penyelenggaraan pangan, diantaranya: “kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan”. Dalam nota keuangan RAPBN 2013, salah satu strateginya adalah dengan program peningkatan produksi pangan. Pemerintah juga tengah mengupayakan perluasan areal dan pengolahan lahan pertanian dengan target 100 ribu hektar sawah dapat dicetak. Sementara untuk perluasan areal hortikultural diharapkan dapat tercapai 16.236 hektar. Di samping itu dengan pengembangan sistem intensifikasi pada terhadap 200 ribu hektar sawah dan

pembenahan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi dan termasuk 485 ribu jaringan irigasi tersier.<sup>95</sup>

Dalam *MDGs 2015* poin pertama menjelaskan tugas negara dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Menunjukkan keseriusan pemerintah saat meratifikasi ini untuk menjadikan kewajiban negeri ini dalam upaya menjaga kesejahteraan rakyatnya lebih nyata bahkan turut andil dalam memberikan kontribusi akan kesejahteraan masyarakat dunia. Upaya penghapusan tingkat kemiskinan penduduk disediakan dalam perlindungan atas *economic security* dengan mengusahakan dalam membuka peluang sebesar-besarnya lapangan kerja untuk masyarakat. Sedangkan, upaya penghapusan tingkat kelaparan penduduk disediakan dalam perlindungan *food security*, yaitu membuka peluang individu dalam aksesibilitas akan kebutuhan pokok pangan.

Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyebutkan kemerdekaan Indonesia, adalah :

... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...

Menggarisbawahi kesejahteraan umum ini sebagai salah satu keinginan utama yang dibangun bersama untuk seluruh rakyat Indonesia harus dapat terpenuhi secara layak. Artinya, telah terpatrit sangat nyata dalam konstitusi bangsa ini tentang langkah yang diatur sedemikian rupa dalam menjaga kondisi pentingnya seorang individu. Banyak aturan yang dibentuk untuk mendukung keterjaminan hak hidup dan berusaha serta memperoleh kesejahteraan dalam menjaga mutu kualitas per-individu yang diinginkan.

---

<sup>95</sup> Eben Ezer Siadari, 2012. *Dunia Diambang Krisis Pangan, Ini Strategi Indonesia*, melalui web <http://jaringnews.com/ekonomi/umum/21266/dunia-diambang-krisis-pangan-ini-strategi-indonesia>. diakses pada tanggal 02 oktober 2013.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kemerdekaan individu di Indonesia pada hakekatnya telah terpatrit dalam konstitusi negara Republik Indonesia dan penjabarannya pada peraturan-peraturan pemerintah dalam berbagai solusinya yang terimplementasi pada bidang-bidang tertentu.
2. Implementasi dari kemerdekaan individu tersebut diatas pada akhirnya akan berkaca pada terciptanya *human security* bagi setiap individu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Indonesia berada dalam posisi yang sedang dalam proses berjuang untuk menjaga kemerdekaan individu dalam negeri ini.

#### **B. Saran-Saran**

1. Pemerintah dituntut secara tegas menegakkan hukum tentang substansi kemerdekaan individu di Indonesia. Begitu banyak aturan hukum yang dibuat dalam menjaga kemerdekaan individu ini, maka diperlukan kinerja yang lebih keras lagi dari pihak negara dalam menegakkannya.
2. Konsistensi pemerintah yang secara aktif dalam melindungi *human security* tentu dapat memberikan nilai positif baik oleh rakyat Indonesia maupun dunia Internasional secara luas. Selanjutnya, pemerintah akan mendapatkan apresiasi yang lebih besar dari rakyatnya dan kerjasama internasional dapat terjalin semakin luas nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Gany, Radi A. 2001. *Pembangunan Berdimensi Insaniah*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Gany, Radi A. 2012. *Gagasan, Pikiran, dan Harapan Terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia*. Kampus Unhas Tamalanrea Makassar. Identitas Universitas Hasanuddin.
- Haryono, Endi dan Saptopo B. Ilkodar. 2005. *Menulis Skripsi Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiawan, Didit. 2012. *Ketahanan Pangan & Radikalisme*, Jakarta: Republika.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Jhamtani, Hira. 2008. *Lumbung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*. INSISTpress: Yogyakarta.
- Jackson, Robert. dan George Sorensen., 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*. Jakarta: gramedia.
- Machan, Tibor R. 2006. *Kebebasan dan Kebudayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mellander, Goran, dkk. 2004. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Brill Academic Publisher.
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nowak, Manfred. 2003. *Pengantar Pada Rezim HAM internasional*. Jakarta: Brill Academic Publisher.
- Rais, Amien. 1989. *Politik Internasional Dewasa Ini*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Silalahi, Johan O. 2012. *Mengurai Masalah Bangsa dan Negara*. Jakarta: Johans Foundation.
- Staggenborg, Suzanne. 2003. *Gender, Keluarga, dan Gerakan-Gerakan Sosial*. Jakarta: Media TOR.

- Sriyono, A Agus, dkk. 2004. *Hubungan Internasional (Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia)*. Jakarta: Gramedia.
- Suryatin dan Savitri (Penterjemah). 1989. *Dunia Macam Apa yang Akan Kita Wariskan pada Anak-Anak Kita?*. Jakarta: Indira.
- Syafari, Muhammad Firdaus, dkk. 2007. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: KOMNAS HAM RI.
- UL Haq, Mahbub, dkk. 1994. *Human Development Report 1994. United Nation Developmnet Programme*. New York: Oxford University Press.
- Wayhuni, Renanti, dkk. 2006. *Buku Panduan Kesadaran Bernegara*. Jakarta: Yayasan Melati.
- Widiastono, Tonny D. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Widyatmadja, Josef P. 2005. *Kebangsaan dan Globalisasi Dalam Diplomasi*. Yogyakarta: Kanisius.

## **B. Jurnal**

- Amri, Ulil. 2011. "Globalisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Keamanan Manusia di Asia Pasifik: Kasus China dan Papua Nugini". *Jurnal Kajian Wilayah I*, Vol.2, No.1. Jakarta: LIPI.
- Asplund, Bo, dan Reyes, Romeo A. 2003. "*Human Security, Human Developments, and The Millenium Development Goals*". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1, No.1. Jakarta.
- Busro, Achmad. 2008. "Penegakan HAM Dalam Hukum Pada Era Globalisasi yang Multidimensional". *MMH*, Jilid. 37, No.3. Jakarta.
- Luhulima, C.P.F. 2003. "Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara". *Terorisme dan Keamanan Manusia*. Analisis CSIS. Jakarta: CSIS.
- Muhammad Ikhwan. 2011. "Ketahanan Pangan Dan Energi:Kondisi Pangan Global dan Agenda Pangan Untuk Indonesia". *Jurnal Diplomasi*. Vol.3. No.3.
- Oratmangun, Djauhari. 2003. "*Human Developments and Human Security: A journey Towards a Humane Global World*". *Jurnal Hukum internasional*, Vol.1, No.1. Jakarta.
- Perwita, AA Banyu. 2003. "*Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia*", *Terorisme dan Keamanan Manusia*. Analisis CSIS. Jakarta: CSIS.

- Subianto, Landry Haryo. 2002. "Konsep *Human Security* : Tinjauan dan Prospek". *Isu-Isu Non-Tradisional : Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. Analisis CSIS. Jakarta: CSIS.
- Susetyo, Heru. 2008. "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia". *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No.1. Jakarta.
- Vermonte, Philips J. 2003. "Isu *Terrorisme* dan *Human Security* : Implikasi Terhadap Studi dan Kebijakan Keamanan". *Global*, Vol.5, No.2. Jakarta: Universitas Indonesia.

### C. Tesis

- Fakhri, Mustafa, "*Hak Asasi dan Keamanan Manusia, Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU Anti-Terrorisme dalam Perspektif Human Security*", Jakarta, Universitas Indonesia, Program Hukum Tata Negara, 2004.
- Irham, Mohammad, "*Isu Polusi Lingkungan China Dalam Hubungan China-Jepang : Perspektif Human Security*", Jakarta, Universitas Indonesia, Program Ilmu Hubungan Internasional, 2009.

### D. Dokumen

- Akyuwen, Roberto. 2011. *Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional*. Dipresentasikan dalam *Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan Ke-138 Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Magelang.
- ASEAN Secretariat. 2009. *Asean Political-Security Community Blueprint*.
- Annan, Kofi. 2000. *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia.* "Two-Day Session in Ulaanbaatar, May 8-10, 2000. Diakses melalui web Press Release SG/SM/7382, <http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html>. Pada tanggal 2 Februari 2013.
- Andreas Maryoto. 2012. *Akar Krisis Pangan Dunia*. Kompas.com. Diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/16/03335110/Akar-Krisis-Pangan-Dunia>. Pada tanggal 02 Oktober 2013.
- Aep Saefullah. 2011. *Indonesia Butuh Strategi Revolusioner Untuk Ketahanan Pangan*. Kompasiana.com Diakses melalui <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/10/27/indonesia-butuh-strategi-revolusioner-untuk-ketahanan-pangan-407190.html>. Pada tanggal 02 Oktober 2013.
- Khan, Sadruddin Aga. 1983. *Komisi Independen Internasional Mengenai Masalah-Masalah Kemanusiaan*. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional.

- Nasir, Tamara. 2006. *Konsep Human Security dan Hak Hidup*. dipresentasikan di Makassar.
- Stalker, Peter 2008. *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*. Pdf File.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Report Of The Government Of The Republic Of Indonesia On The Implementation Of International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights*.
- Tim Pengkajian Fakultas Hukum di Bawah Koordinasi Lembaga Penelitian UID, 1995. *Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, Ditinjau Dari Segi Pancasila dan UUD 1945 Atas Dasar Keimanan dan Ketaqwaan Kepada ALLAH Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Lembaga Penelitian UID, Universitas Islam Djakarta.
- United Nations. 2013. *The Universal Declaration of Human Rights*. Diakses melalui <http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml>. Pada tanggal 25 Mei 2013.
- United Nations. 2012. *Consideration of Reports Submitted by States Parties under article 40 of the International Covenant on Civil and political Rights, Initial Reports of State Parties Indonesia*. Human Rights Committee.

## Internet

- \_\_\_\_\_. 2013. *Dua terduga teroris ditembak mati di Sulsel*. Diakses melalui [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/01/130104terorissulselditembak.html](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130104terorissulselditembak.html). Pada tanggal 02 Februari 2013.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Densus Dituding Langgar HAM, Polri Pasang Badan*. Diakses melalui <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/16/063454834/DensusDituding-Langgar-HAM-Kapolri-Pasang-Badan.html>. Pada tanggal 02 Februari 2013.
- Eben Ezer Siadari, 2012. *Dunia Diambang Krisis Pangan, Ini Strategi Indonesia*. Diakses melalui <http://jaringnews.com/ekonomi/umum/21266/dunia-diambang-krisis-pangan-ini-strategi-indonesia>. Pada tanggal 02 oktober 2013.
- HSRG, 2010. *Human Security Beckgrounder*. Diakses melalui <http://www.hsrgroup.org/press-room/human-security-backgrounder.aspx>. Pada tanggal 02 Februari 2013.

- Jan Van Dijk, 2004. *Human Security: A New Agenda for Integrated, Global Action*. Diakses melalui [http://www.unodc.org/unodc/en/aboutunodc/speeches/speech\\_2004-04-01\\_1.html](http://www.unodc.org/unodc/en/aboutunodc/speeches/speech_2004-04-01_1.html). Pada tanggal 02 Februari 2013.
- KUKPRI, 2012. *Target MDGs Indonesia*. Diakses melalui <http://www.idonesia.tv/media/target-mdgs-indonesia>. Pada tanggal 02 Oktober 2013.
- Mohamad Final Daeng, 2010. *Pemuda: Kemerdekaan Tanpa Kedaulatan*. Diakses melalui <http://regional.kompas.com/read/2010/08/17/20011095/Pemuda.Kemerdekaan.Tanpa.Kedaulatan>. Pada tanggal 02 Februari 2013.
- Mahela dan Adi Sutanto. Jurnal Protein, Vol 13. No.2.2006. *Kajian Konsep Ketahanan Pangan*. Diakses melalui [http://www.google.com/url?q=http://ejournal.umm.ac.id/index.php/protein/article/viewFile/66/66\\_umm\\_scientific\\_journal.doc&sa=U&ei=eZoXZmhBMeJrAeJr4G4DQ&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNEXEh4dOApbQ\\_WbxrK-5Eci58kUZw](http://www.google.com/url?q=http://ejournal.umm.ac.id/index.php/protein/article/viewFile/66/66_umm_scientific_journal.doc&sa=U&ei=eZoXZmhBMeJrAeJr4G4DQ&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNEXEh4dOApbQ_WbxrK-5Eci58kUZw). Pada tanggal 02 oktober 2013.
- Nuhfil Hananni, 2013. *Ketahanan Pangan*. Diakses melalui <http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pd>. Pada tanggal 02 oktober 2013.
- Sandro Gatra, 2013. *Kepuasan Terhadap Kepemimpinan SBY Turun*. Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/29/16581310/Kepuasan.terhadap.Kepemimpinan.SBY.Turun.html>. Pada tanggal 2 Februari 2013.
- UNTFHS, 2010. *What is human security? (Inter-Amecian Institute of HR)*. Diakses melalui [http://www.iidh.ed.cr/multic/default\\_12.aspx?contentidoid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c3391de83fb42](http://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contentidoid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c3391de83fb42) & Portal=IIDHSeguridad EN#Background. Pada tanggal 2 Februari 2013.
- United Nations Documents. 2013. *The Universal Declaration of Human Rights*. Diakses melalui <http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml>. Pada tanggal 25 Mei 2013.
- United Nations Documents. 2013. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Diakses melalui <http://www.un-documents.net/iccpr.html>. Pada tanggal 25 Mei 2013.
- United Nations Documents. 2013. *Declaration On The Rights Development 1984*. Diakses melalui <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.html>. Pada tanggal 25 Mei 2013.